JAMAL SYARIF

Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI

BANJARMASIN

DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

OLEH:

JAMAL SYARIF

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2015

DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Penulis:
Jamal Syarif

Cetakan I, Oktober 2014

Desain Cover:
Agung Istiadi

Tata Letak:
Iqbal Novian

Penerbit:
ANTASARI PRESS
JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telp.0511-3256980
E-mail: antasaripress@iain-antasari.ac.id

Percetakan:
Aswaja Pressindo
Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik
Sleman Yogyakarta
Telp. 0274-4462377
E-mail: aswajapressindo@gmail.com

15.5 x 23 cm; viii + 86 halaman

ISBN: 602-0828-27-1

PRAKATA

Buku ini semula merupakan hasil penelitian dari penulis dari tesis penulis yang berjudul: *Pengembangan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Mulai Tahun 1972 Sampai 2000*. Struktur dan subsatnasi tesis masih penulis pertahankan, tetapi dalam penulisan bab I pendahuluan dan metode, mengalami penyesuaian. Dengan langkah ini, penulis mengharapkan buku ini tidak saja dapat dibaca dan berguna bagi kalangan masyarakat luas, tetapi berguna pula untuk mahasiswa dan personel yang ada di dunia akademik di perguruan tinggi. Terutama mahasiswa yang berminat mengkaji lebih lanjut tentang dinamika sebuah lembaga pendidikan.

Penulis sangat berterima kasih dengan Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), pembimbing tesis penulis yang secara stuktural beliau termasuk bagian dalam organisasi Muhammaddiyah, namun sangat paham tentang pengembangan pendidikan di NU. Terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada seluruh pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Daerah Istimewa Yogyakarta, atas kesediaan menyampaikan informasi yang sangat berharga untuk penyelesaian tesis tersebut.

Akhirnya penulis berterima kasih kepada LP2M IAIN Antasari yang bersedia menerbitkan tesis penulis menjadi sebuah buku. Penulis mengharap agar buku ini berguna bagi seluruh komponen masyarakat, terutama civitas akademik yang perhatian dalam persoalan pendidikan di Indonesia.

Kertak Hanyar, 28 Agustus 2015

Jamal Syarif

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	TRANSLITERASI	ARAB	TRANSLITERASI
ا	Tidak dilambangkan	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘ (koma terbalik di atas)
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h (h bergaris di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’ (apostrof)
ص	sh	ي	y
ض	dh	ة	t

Artikel ditulis al- misalnya: الكِتَابُ = al-kitab

دَارُ الكِتَابِ = Dar al-kitab

kecuali pada kata yang berhubungan dengan kata Allah, misalnya:

عَبْدُ اللهِ = 'Abd Allah

سُنَّةُ اللهِ = Sunnat Allah

Adapun huruf ta marbutahat (ةَ) pada nama orang, nama hukum, nama istilah, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia tidak lagi ditulis dengan t, tetapi ditulis dengan h, misalnya: Madrasah Aliyah (bukan Madrasat 'Aliyat), Tsanawiyah (bukan ditulis Tsanawiyat), dan sebagainya.

Untuk mad:

a = a panjang

u = u panjang

i = i panjang

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)[1] pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya pada awalnya bukan merupakan organisasi politik, melainkan sebuah organisasi *diniyah ijtima'iyah/ijtima'iyah diniyah* atau keagamaan sosial/sosial keagamaan. Motif non politik ini terus menjiwai kehidupan organisasi selanjutnya.[2]

---

[1] Nahdlah berarti bangkit atau gerakan, Ulama adalah bentuk plural dari kata 'Alim yang secara harfiyah berarti orang yang menguasai ilmu agama Islam secara mendalam. Jadi Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Tokoh pendiri NU adalah K. H. Hasyim Asy'ary, K. H. Abdul Wahab Hasbullah dan K. H. Bisri Samsuri. Lihat Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926,* (Jakarta: Erlangga, 1992), p. 1, Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), p. 61, A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 1995), p. 6, dan Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Terj. H. M. Muljadi Djojomartono, (Jakarta: tp., 1996), pp. 322-3

[2] Pembentukkannya dianggap sebagai respon terhadap aktivitas kelompok reformis, yakni Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif di gerakan politik, yakni Sarekat Islam (SI). Selain itu, peristiwa Kongres Dunia Islam di Mekkah, serta pelarangan pengajaran ajaran *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* di Masjid al-Haram juga menjadi faktor pendorong terbentuknya organisasi ini. Dalam Kongres Dunia Islam itu, delegasi Indonesia hanya diwakili oleh kalangan Islam reformis, dan sama sekali tidak menyertakan kalangan Islam Tradisional. Kalangan Tradisional lalu membentuk delegasi sendiri ke

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pesantren dan madrasah yang dikelola oleh NU. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya sektor pendidikan yang menjadi garapan NU tidak saja terbatas pada kedua institusi pendidikan di atas, tetapi sudah meluas pada pendirian dan pengembangan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi. Pendirian dan pengembangan sekolah dan perguruan tinggi tersebut tidak terlepas dari upaya NU untuk merespon perkembangan zaman yang menuntut kualitas pendidikan yang lebih kompetitif dalam persaingan global.

NU menganggap pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Pendidikan bagi NU adalah:

> "Upaya mengembangkan individu manusia untuk menjadi manusia yang aktual, yang mampu mengemban fungsi "Khalifah" di bumi, bukan sebagai alat produksi yang siap pakai. Sistem pendidikan yang menekankan transfer pengetahuan dan teknologi hanya merendahkan derajat manusia, karena anak didik dipandang sebagai tabungan pengetahuan dan teknologi, yang kelak nanti dapat digunakan untuk hidupnya, sedang fungsi guru menurun, hanya sebagai alat pemindah pengetahuan dengan target yang telah ditentukan pihak lain, bukan sebagai pendidik anak."[3]

Melihat betapa pentingnya pendidikan sebagai upaya menfasilitasi anak untuk menjadi dirinya sendiri yang akan hidup dan membangun masyarakat kelak dalam kehidupan masyarakat sipil yang beragam, NU berusaha menghapus dikotomi antara pendidikan agama dan umum.

Oleh karena itu, pengembangan pendidikan mutlak diperlukan, apalagi di era globalisasi sekarang yang menjadi keniscayaan sejarah kemanusiaan, yang mau tidak mau harus diantisipasi oleh NU. Ke-

---

Mekkah untuk meminta Ibnu Sa'ud menjamin kelestarian mazhab-mazhab ortodok serta kegiatan tarekat di Hijaz (kini Arab Saudi). Delegasi ini semula diberi nama Komite Hijaz, kemudian dirubah menjadi Nahdlatul Ulama. Lihat A. Gaffar Karim, *Metamorfosis...*, p. 49, dan Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), p. 32-4

[3] *Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekjen PBNU, 2001), p. 78

mampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dielakkan, karena Islam tidak mengenal parsialitas. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi warga NU harus bersifat holistik, maksudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan pemahaman dan kearifan terhadap hubungan-hubungan eksis-tensial antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama-nya, dan manusia dengan alam sekitarnya.

Sekolah-sekolah yang identik dengan pendidikan umum tidak lagi hanya bertumpu pada Muhammadiyah, NU pun sekarang sudah mengembangkan pendidikannya. NU tidak hanya memiliki pondok pesantren dan madrasah, tetapi ia juga memiliki sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi. Sikap ini diambil NU sebagai respon terhadap tuntutan zaman dan sebagai tanggung jawab moral untuk menyiapkan dan memajukan sumber daya warganya agar mampu memiliki keunggulan yang kompetitif dan bisa *survive* di tengah persaingan hidup yang semakin ketat.

Sampai masa-masa akhir dekade 1960-an, pendidikan di kalangan modernis (Muhammadiyah) memang bertumpu pada sekolah-sekolah, sementara di kalangan tradisional (NU) berpusat pada pesantren dan madrasah. Namun hal ini tidak lagi terjadi pada masa-masa berikutnya karena mobilisasi kaum muslimin dalam bidang pendidikan terarah pada sistem pendidikan yang tidak lagi dikotomis.[4]

Melihat historisitas Muhammadiyah dan NU, ulama-ulama NU seperti K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. A. Wahab Hasbullah, sebagaimana K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Mhammadiyah), pernah selama bertahun-tahun menimba ilmu di Mekkah, di mana pengaruh paham Wahabiyah sangat signifikan. Perbedaan kalangan Muhammadiyah dan kalangan NU bukanlah pada persoalan menolak atau menerima paham pembaharuan. Menurut Einar Martahan Sitompul, kalangan ulama NU juga menerima paham pembaharuan, tetapi penerimaannya menye-suaikan dengan tradisi yang mereka anut.[5]

---

[4] M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1993), pp. 23-41

[5] Einar Martahan Sitompul, *NU...*, pp. 58-62

Oleh karena itu, selain tetap pada tradisi awalnya, yakni mengembangkan pesantren dan madrasah, NU juga mengembangkan sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi menurut paham yang mereka anut, yakni: *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.*

NU membentuk satu lembaga yang khusus menangani bidang pendidikan dan penagajaran, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif, di mana tugasnya melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren.[6]

Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat dibentuk pada tanggal 21 Sya'ban 1380 H/7 Februari 1961 M.[7] Pembentukan Lembaga Pendidikan Ma'arif di tingkat nasional tersebut didahului oleh dibentuknya Lembaga Pendidikan Ma'arif di daerah-daerah. Lembaga Pendidikan Ma'arif daerah Yogyakarta saja sudah ada semenjak tahun 1940-an dan mendapat akte dari pemerintah pada tahun 1976.

Menurut data tahun 1998, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah memiliki 116 unit Madrasah Ibtidaiyah, 17 unit Madrasah Tsanawiyah, 3 unit Madrasah Aliyah, 17 unit SLTP, 10 unit SMU, 6 unit SMK (STM), 3 unit SMK (SMKK), 3 unit SMK (SMEA), 1 unit SLB, dan 1 unit Perguruan Tinggi (STIT).[8]

---

[6] Makna kata "selain" pada kutipan di atas menyatakan bahwa Pondok Pesantren tidak termasuk dalam bidang garapan Lembaga Pendidikan Ma'arif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya, karena kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan Pondok Pesantren dilaksanakan oleh *Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI). Perangkat organisasi NU, seperti yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga terdiri dari Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Termasuk di dalamnya Lembaga Ma'arif NU. Lajnah adalah perangkat organisasi NU untuk melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus. Sedangkan Badan Otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan. Lihat *Hasil...*, pp. 127-30

[7] Peraturan Dasar No. 103 Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jakarta. Pasal 2

[8] Arsip daftar lembaga-lembaga pendidikan di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif DI Yogyakarta tahun 1998/1999.

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY sudah memiliki banyak lembaga-lembaga pendidikan. Secara bertahap Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mengembangkan lembaga pendidikan-pendidikan baik penambahan madrasah/sekolah, jurusan, maupun sistem pendidikan.

Eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY hampir sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi, yakni berkenaan dengan masih kurang mampunya bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan serupa yang dikelola oleh organisasi sosial keagamaan lainnya, apalagi dengan sekolah-sekolah swasta bergengsi yang mulai menjamur di hampir semua daerah. Namun demikian, dari segi administrasi, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di daerah-daerah lain. Hal ini bisa terjadi karena luas wilayahnya relatif kecil sehingga dapat dijangkau dengan mudah.

Selain itu, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, sangat potensial dalam pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mengambil peluang tersebut untuk mengembangkan pendidikan di tengah pusat pendidikan reformis dan basis organisasi reformis Indonesia terbesar (Muhammadiyah). Walaupun demikian, kebanyakan muslim di Yogyakarta tetap berpegang pada formulasi Islam tradisional.[9] Oleh karena itu, eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dihadapkan pada dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi ia berada di kota yang merupakan basis organisasi reformis (Muhammadiyah), di sisi lain Yogyakarta memiliki masyarakat yang kultur sosialnya menguntungkan NU. Situasi seperti ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY untuk mengembangkan pendidikannya. Oleh karena itu menarik untuk diteliti.

Melihat adanya peningkatan pengembangan pendidikan yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY di atas, penulis menganggap penting memaparkan perjalanan dinamika lembaga pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mulai tahun 1972 sampai 2000.

---

[9] Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticisme in The Sultanate of Yogyakarta*, (United States of Amerika: The University of Arizona Press, 1989), p. 244

Dinamika pendidikan yang penulis maksud adalah dinamika pengembangan institusi pendidikan yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY pada rentang waktu tersebut. Lembaga pendidikan yang penulis maksud adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY.

Penulis berusaha mendeskripsikan dinamika pengembangan pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mulai tahun 1972 sampai 2000 yang meliputi tentang 1) latar belakang pembentukkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY; 2) posisi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dalam tubuh NU; 3) konsep pendidikan menurut lembaga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY; dan 4) sistem dan institusi apa saja yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY; serta 5) manajemen pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY.

A. Telaah Pustaka

Diskursus tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pesantren dan madrasah memang telah banyak dilakukan orang, di antaranya Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Maksum dalam *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Hasbullah dalam *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, dan Hanun Asrahah dalam *Sejarah Pendidikan Islam.*

Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, menjelaskan bahwa sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia bermula dari sistem pesantren di surau-surau kecil, bergeser ke sistem madrasah dan akhirnya menjadi sekolah. Perubahan bentuk dam isi pendidikan Islam tersebut tidak lepas dari tuntutan dari tuntutan perkembangan jaman yang dihadapinya. Namun proses perubahan itu bukan suatu peristiwa yang lancar dan mulus tanpa perselisihan pendapat di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Latar belakang pendidikan kolonial ikut menentukan ketegangan perubahan dari tradisi yang sangat kukuh ke cara modern yang mendesak.

Maksum mengkhususkan penelitian tentang madrasah dalam bukunya *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Maksum menjelaskan sejarah perkembangan madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam, dan menjelaskan pandangan normatif ajaran Islam sebagai landasan atau pedoman dasar dalam membentuk karakter ideal pendidikan Islam yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai sejauh mana sebuah lembaga pendidikan seperti madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu perlu diketahui, bagaimana perkembangan madrasah ini dan dimana posisi madrasah NU di dalamnya.

Selanjutnya Hasbullah, dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, membahas mulai masuknya Islam ke Indonesia sampai berdirinya organisasi-organisasi sosial keagamaan dan peranannya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Termasuk di dalamnya NU. Buku yang disusun sesuai dengan kurikulum dan silabus mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pada Fakultas Tarbiyah IAIN itu memaparkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU secara umum, baik itu pesantren, madrasah, ataupun sekolah.

Lebih lengkap buku karya Hasbullah, Hanun Asrahah dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam* mengulas Sejarah Pendidikan Islam dari masa klasik sampai masa modern. Termasuk di dalamnya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari perkembangan awal hingga sekarang. Di samping menjelaskan *Halaqah, Maktab, Majlis, Khan, Ribath, Rihlah Ilmiyah, Waqf, dan Madrasah*, buku ini juga membahas sistem pendidikan di Indonesia yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan. Sama halnya dengan Hasbullah, Hanun Asrahah juga hanya memaparkan sepintas tentang konsep dan lembaga pendidikan yang ada di NU, dia juga tidak membicarakan secara khusus lembaga pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Buku-buku seperti *Quo Vadis NU* karya Kacung Marijan, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan* karya M. Masyhur Amin, *NU Pasca Khittah (Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah)* karya Khoirul Fathoni dan Muhammad Zien, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* yang diedit oleh Greg Fealy dan Greg Barton, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* karya Martin van

Bruinessen serta *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia* karya A. Gaffar Karim, porsi pembahasan dalam buku-buku tersebut hanya membicarakan persentuhan NU dengan dunia politik di Indonesia. Eksistensi NU memang tidak bisa dilepaskan dengan situasi dunia politik di Indonesia. Secara umum keadaan tersebut juga membawa pengaruh kepada eksistensi lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Buku *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman* yang diedit oleh Yunahar Ilyas, dkk. membicarakan tentang wawasan pergerakan, wawasan sosial politik, wawasan ekonomi, wawasan pemikiran keislaman, dan wawasan pendidikan yang terdapat pada kedua organisasi tersebut. Khusus tentang wawasan pendidikan yang terdapat pada kedua organisasi tersebut. Khusus tentang wawasan pendidikan, kedua organisasi ini berusaha mencari paradigma baru dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pembicaraan itu hanya merupakan konsep, belum sampai kepada pembicaraan praktis tentang pendidikan yang ada di kedua organisasi tersebut.

Buku-buku yang disebutkan di atas merupakan buku sekunder dalam penelitian ini. Buku primernya adalah buku *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* karya Andree Feillard dan buku *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* karya H. A. Hasyim Muzadi.

Buku *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* karya Andree Feillard yang merupakan revisi subtansial dari disertasinya, membahas secara tuntas eksistensi NU, baik sebagai organisasi sosial keagamaan maupun keterlibatannya dalam dunia politik di Indonesia, dan persentuhannya dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia mulai dari berdirinya tahun 1926 sampai tahun 1995, yang antara lain terlibat perdebatan dalam penetapan Dasar Negara Indonesia, sikap anti Komunis, serta penggabungan dan pengunduran dirinya dari PPP. Masalah pendidikan pun tidak luput dari perhatiannya, baik lembaga pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Khusus tentang pendidikan, Andree Feillard melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, serta tokoh-tokoh NU lainnya. Di sana dijelaskan perbaikan hubungan NU dengan pemerintah dan dampaknya

terhadap pendidikan. Buku ini banyak memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di berbagai daerah, termasuk di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY.

H. A. Hasyim Muzadi dalam bukunya *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* juga menaruh perhatian pada permasalahan pendidikan yang ada di tubuh NU. Buku yang diedit dari hasil wawancara panjang dengan H. A. Hasyim Muzadi ini tidak lebih merupakan sebuah upaya penelusuran masalah yang dihadapi NU sebagai organisasi sosial keagamaan, serta pemotretan sejumlah pandangan dan ide H. A. Hasyim Muzadi di seputar isu atau polemik ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang menjadi *concern* NU selama ini. Di sana dinyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan non pesantren yang ditangani NU bisa dikatakan tertinggal cukup jauh dibanding lembaga-lembaga pendidikan serupa yang dikelola oleh organisasi sosial keagamaan lainnya. Buku ini memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis untuk mengetahui apakah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY juga mengalami permasalahan serupa sebagaimana yang dikemukakan oleh H. A. Hasyim Muzadi tersebut. Oleh karena itu penulis berusaha menelusuri perjalanan sejarah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dan upaya pengembangan pendidikannya.

B. Kerangka Teoritis

Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa pada permulaan abad ke-20, organisasi-organisasi Islam berusaha memperbaiki pendidijkan Islam, baik dari segi isi maupun metodenya. Mereka berusaha memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.[10]

Salah satu bentuknya adalah mendirikan sekolah-sekolah. Dengan demikian pesantren dan madrasah (terutama Madrasah Diniyah) jumlahnya semakin sedikit dan sekolah semakin banyak. Namun kenyataannya, pesantren juga mendirikan madrasah dan sekolah, baik Madrasah Diniyah yang hanya mengajarkan pokok-pokok agama Is-

---

[10] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1994), p. 28

lam, maupun madrasah dalam pengertian institusi pendidikan formal yang dikelola oleh Departemen Agama, sehingga pesantren dan madrasah masih tetap eksis sampai sekarang.

Organisasi NU merupakan salah satu wujud dari fenomena di atas. Terlihat K.H. Moh. Ilyas[11] atas persetujuan K.H. Hasyim Asy'ari, memasukkan pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah, dan Bahasa Melayu ke Pesantren Tebuireng. Setelah itu Pesantren Tebuireng menjadi pesantren yang termasyhur di seluruh Indonesia dengan kurang lebih 6000 orang santri. Sistem diterapkan di Pesantren Tebuireng memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan Islam untuk lebih terbuka lagi pengembangan pendidikan Islam.[12]

Berbicara mengenai pendidikan Islam berarti juga berbicara dengan suasana di masa yang akan datang. Berhasil tidaknya sangat ditentukan dengan pembentukkan sikap dan tanggung jawab di masa sekarang, serta berlandaskan pada kultur sosial masa lalu. Dalam kontek inilah NU berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dan mengembangkan pendidikannya sekaligus mendorong agar nilai-nilai agama khususnya dalam bidang *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* tetap diajarkan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Pendidikan yang ada di organisasi ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bermula dari pengajaran agama dalam kitab-kitab klasik, merambah kepada pengajaran ilmu-ilmu umum, dan sekarang bukan hanya isi dan metodenya saja yang dikembangkan, tapi sudah pada pengembangan institusinya. Melihat fenomena tersebut, NU kelihatannya berusaha memodernisasikan dunia pendidikannya setahap demi setahap.

Lembaga Pendidikan Ma'arif, sebagai salah satu lembaga yang ada di organisasi NU, dibentuk untuk menangani masalah pendidikan tersebut, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren. Eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan sebuah perangkat

---

[11] K.H. Moh. Ilyas adalah murid tertua K.H. Hasyim Asy'ari yang selain menjadi santri, juga bertugas dalam pengajaran dan kehidupan sehari-hari di pesantren. Dari murid tertua inilah dilakukan pengembangan pendidikan dalam NU. Lihat *Ibid.*, p. 69

[12] *Ibid.*, p. 71

organisasi di tubuh NU yang keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NU *an sich*, di mana pembentukkan dan penghapusan lembaga-lembaga yang ada ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan NU.

Sayangnya, pengembangan kelimuan yang menjadi prasyarat untuk membenahi kualitas SDM warganya agak terabaikan, betapapun usaha penyediaan sarana fisik di berbagai lembaga pendidikan cukup digalakkan, cuma karena tidak diimbangi oleh kematangan agenda pemberdayaan yang lebih sistematis dan berjangka panjang, program peningkatan pembangunan infrastuktur tersebut akhirnya tidak berdayaguna tinggi. Begitu pula di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang sebagian pengelolanya kurang profesional dalam pendidikan itu sendiri.[13]

Menurut Andree Feillard, "pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi para aktifis pada kegiatan politik menjadi penyebab lemahnyasistem pendidikan NU".[14] Adapun H. A. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kegagalan pemenuhan target pengelolaan tersebut dikarenakan dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, lemahnya manajemen yang berujung pada stagnasi atau bahkan kebangkrutan secara perlahan. *Kedua*, ketidakjelasan porsi NU yang mempertegas adanya ikatan kepemilikan atau setidaknya koordinatif keorganisasian. Hubungan koordinatif keorganisasian yang kabur merupakan variasi lain dari ketidakjelasan tersebut yang kebanyakan menyelimuti pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Di satu sisi tidak sedikit dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut yang memiliki kualitas bagus dan secara mandiri berhasil mengembangkannya sesuai dengan tuntutan profesionalitas manajemen. Tanpa meninggalkan nuansa kepesantrenan yang mengental dalam komposisi kurikulumnya, lembaga-lembaga pendidikan ini juga menawarkan berbagai kelebihan yang menjadi produk andalan lembaga-lembaga pendidikan swasta maupun negeri pada umumnya. Sementara di sisi lain, jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang juga

---

[13] H. A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, (Jakarta: Logos, 1994), p. 28

[14] Andree Feillard, *NU* ...., p. 305

menginduk pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri.[15]

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau, maka sangatlah tepat menggunakan metode historis.[16] Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY, dokumen-dokumen dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data-data dari pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dan dokumen-dokumen merupakan sumber primer penelitian ini, sumber sekunder berasal dari buku-buku yang relevan. Data-data tersebut dikumpulkan melalui:

1. Wawancara/interviu dengan orang-orang yang memilki data-data tentang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY, yaitu kepada pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dan pengurus PWNU DIY. Dalam hal ini penulis memakai teknik Interviu Bebas Terpimpin,[17] di mana pedoman interviu yang dipersiapkan hanya mencamtumkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan. Pokok-pokok pertanyaan tersebut disusun sesuai data yang diperlukan, selanjutnya dalam bertanya penulis dapat melakukannya secara bebas dalam kalimat sendiri. Dengan demikian setiap informasi dapat digali secara mendalam dan maksimal sesuai dengan keperluan.
2. Dokumen-dokumen, baik Surat Keputusan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Laporan-laporan kegiatan maupun laporan pengurus, serta arsip-arsip lainnya.
3. Bahan kepustakan, dengan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif secara umum maupun dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif DIY secara khusus. Data dari kepustakaan ini merupakan data pelengkap dari data-data yang lain.

---

[15] H. A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama ...*, pp. 37-9

[16] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logus Wacana Ilmu, 1999), p. 54

[17] Tentang teknik interviu dapat dilihat pada H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), pp. 110-16

Data-data tersebut dikritik unutk memperoleh keabsahan data, baik keaslian sumber (otentisitas), yang dilakukan melalui kritik ekstern, maupun tentang kesahihan sumber (kredibilitas), yang ditelusuri melalui kritik intern.[18]

Data-data penelitian yang diperoleh dari teknik pengumpulan data di atas, mulai dianalisis sejak pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar seluruh bahasan menyatu secara integral dan interaktif. Data-data yang terkumpul disaring, disusun, dan dihubungkan satu sama lain. Melalui proses ini penyimpulan dibuat. Proses ini disebut proses interaktif.[19]

Pengumpulan dan penganalisisan data dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut penulis sesuaikan dengan periodesasi kepengurusan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY, yaitu 1972-1977, 1977-1982, 1982-1987, 1987-1992, 1992-1997, 1997-2002. Periodesasi tersebut penulis bagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap pencarian jati diri (1972-1982), tahap kemapanan (1982-1992), dan tahap pencarian paradigma baru (1992-2000).

D. Struktur Tulisan

Penulisan ini terdiri lima bab. Pada bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, di mana pentingnya diskursus tentang lembaga pendidikan sebagai wadah untuk membentuk insan-insan yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa yang tinggi. Penelitian ini dikhususkan pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY sehingga penulisan ini terfokus pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY.

Pada bab II penulisan kemukakan dinamika pendidikan NU, di mana di tubuh organisasi ini diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Pada bab ini dijelaskan persentuhan lembaga-lembaga pendidikan tersebut

---

[18] Lihat Dudung Abdurrahman, *Metode ....*, pp. 58-63, dan H. Hadari Nawawi, *Metode ...*, p. 80

[19] Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), p. 19

dengan situasi dan kondisi yang menyertai pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, dikemukakan pula perkembangan pula perkembangan pemikiran pendidikan di lingkungan NU. Perkembangan pemikiran tersebut terwujud dalam sistem, institusi, dan manajemen pendidikannya. Beranjak dari hal tersebut, dikemukakan pula sistem dan institusi pendidikan NU serta manajemen pendidikannya.

Untuk menangani masalah pendidikan formal dan non formal, selain pondok pesantren di struktur organisasi NU, dibentuklah Lembaga Pendidikan Ma'arif. Oleh karena itu pada bab III penulis kemukakan tentang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam pendidikan NU. Pada bab ini dikemukakan posisi, fungsi, dan peranan Lembaga Pendidikan Ma'arif dalam struktur NU.

Pada bab IV penulis kemukakan tentang pengembangan institusi pendidikan yang telah dilakukan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Pada bab ini juga dikemukakan sejarah perjalanan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan, konsep pendidikan, sistem dan institusi yang dikembangkan, serta pola manajemen pendidikannya.

Semua pembahasan di atas penulis simpulkan pada bab V.

BAB II
EKSISTENSI PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Dinamika Pendidikan Nahdlatul Ulama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam paling tidak dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi internal, di mana manusia yang lahir telah diberi potensi (fitrah) yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang untuk menpopang kehidupannya, dan sisi eksternal, di mana pendidikan ditempatkan pada bagaimana memberikan suasana kondusif bagi pengembangan etos kultural manusia, sehingga dalam kehiduapan riil dapat melakukan interaksi dengan lingkungannya dan mampu melakukan peran-peran sosial yang lebih luas.[20]

Melihat urgensi pendidikan Islam dari dua sisi di atas, maka peran pemerintah dalam pengembangan sistem pendidikan Islam secara luas ikut menentukan. Dalam kontek Indonesia, telah diketahui ada masanya sistem pendidikan Islam dipinggirkan dan dieliminir oleh pemerintah yang berkuasa (Belanda), kemudian pada masa lain (pasca kemerdekaan), karena sistem pendidikan Islam dipandang telah berjasa dalam sejarah bangsa dan merupakan aset negara, maka ia mendapatkan posisi yang strategis dan cukup kuat secara yuridis,

---

[20] Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, (Yogyakarta: Sipress, 1994), p. 137

sehingga peluang untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam akan lebih mantap.

Posisi yang cukup kuat tersebut dapat dilihat misalnya pada diktum Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri dalam Negeri pada tahun 1975[21] tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, yang berisi:

a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat;
b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas;
c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.[22]

Adanya SKB tersebut ditindaklanjuti dengan pembakuan kurikulum madrasah pada tahun 1984, sehingga memungkinkan bagi lembaga pendidikan Islam untuk *survice*, mampu memberikan peran aktif sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan masyarakat. Posisi lembaga pendidikan Islam menjadi lebih mantap lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 1989 yang telah menempatkan pendidikan Islam ke dalam sub sistem pendidikan nasional.

Penyatuan sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional telah membawa beberapa konsekuensi, di antaranya adalah diadakannya penjenjangan secara tegas, penyeragaman kurikulum, dan adanya tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diserahkan kepada Departemen Agama. Konsekuensi lainnya adalah lembaga pendidikan Islam justru semakin sarat

---

[21] Pada waktu itu Menteri Agama dijabat oleh A. Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Sjarief Thayeb, dan Menteri dalam Negeri dijabat oleh Amir Machmud. Menteri Dalam Negeri dilibatkan karena para guru Sekolah Dasar Negeri ditunjuk oleh Pemerintah menerima gaji dari Departemen Dalam Negeri. Lihat Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), p. 241

[22] SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, Bab II, pasal 2.

beban. Di satu sisi ia harus mampu menunjukkan keberhasilan pembelajaran sesuai dengan standar sekolah umum, di sisi lain ia harus menunjukkan keberhasilan pembelajaran sesuai dengan standar dan parameter sekolah yang bermisikan Islam, maka tidak sedikit kritik yang dilontarkan terhadap pelaksanaan pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan Islam.[23]

Kritik yang dilontarkan terhadap sistem pendidikan Islam, misalnya menyangkut *in put* (anak didik) yang memiliki kemampuan rendah sehingga berpengaruh pada kualitas *out put* yang rendah pula, proses pembelajaran yang kurang maksimal dan faktor guru yang kurang profesional sehingga mengurangi mutu pembelajaran.

Pada awalnya orientasi pendidikan Islam di Indonesia cenderung berkonsentrasi pada urusan ukhrawi, dan mengesampingkan urusan duniawi.[24] Menurut Abdul Munir Mulkhan, hal ini mengakibatkan pendidikan Islam tidak sedikit pun memberi peluang untuk mengembangkan nurani dan akal sehat yang universal yang membawa kepada pertumbuhan intelektualitas manusia itu sendiri.[25]

Sebagai suatu sistem yang dinamis, pendidikan Islam terus menerus disoroti masyarakat. Sidang pendapat mengenai sistem Islam merupakan hal yang lazim mengemuka karena proses pendidikan itu sendiri akan terus menerus ditantang oleh perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan perubahan konsep pendidikan Islam dalam upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kini, orientasi sistem pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Orientasinya telah berkembang, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi, pemikiran, keterbukaan, dan pandangan ke depan semakin menguat. Sistem pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan rohani, pendidikan hati, dan pendidikan akhlak semata, tetapi ia juga menyiapkan manusia seutuhnya

---

[23] Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amissco, 1996), pp. 22-6

[24] Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991), p. 32

[25] Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, (Yogyakarta: Sipress, 1993), p. 224

dengan memberikan porsi seimbang kepada jasmani, akal, dan keterampilan manusia.[26]

Jika sistem pendidikan Islam tidak mengapresiasikan dan mengantisipasi terhadap percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan social, maka akan mengakibatkan krisis relavansi pendidikan Islam itu sendiri, sehingga dapat dipastikan akan kehilangan perananya dalam memberikan bekal hidup bagi serta masyarakat pengguna Pendidikan Islam tersebut. [27]

Seiring dengan proses perkembangan orientasi tersebut, metode pendidikan Islam di Indonesia pun pada awalnya tampak masih klasik. Dalam menyampaikan mata guru pelajaran, guru cenderung tidak member kesempatan pada anak didik untuk menyikapi mata pelajaran, guru cenderung tidak memberi kesempatan pada anak didik untuk menyikap mata pelajaran tersebut secara kritis. Metode belajar mengajar masih bertumpu pada upaya mengahafal dan lebih mengutamakan pengayaan materi. Padahal metode pendidikan – menurut Abdul Munir Mulkhan – sangat erat kaitannya dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri,[28] di mana manusia memiliki jiwa yang dinamis, kreatif dan inovatif. Dengan demikian, mengekang kreatifitas berfikir anak didik berarti mengekang fitnah manusia itu sendiri. Paulo Freire mengangkap model pendidikan seperti ini sebagai model pendidikan yang membelenggu, di mana naka didik dibuat menjadi objek yang pasif dari tindakan guru.[29]

Namun demikian, kini keadaannya mulai berubah, karena kelompok-kelompok diskusi telah berkembang di mana-mana dan anak didik yang pada awalnya lebih bersikap pasif, kini sudah mulai menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis. Dengan kata lain belajar dengan cara memecahkan masalah sudah semakin membudaya.

---

[26] Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, Terj. H. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), p. 39

[27] Abdul Munir Mulkhan, "Pengembangan Tradisi Intelektual dalam Pendidikan Islam" dalam *Al-Jamiah,* No. 54 Tahun 1994, p. 54

[28] Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma ….,* p. 250

[29] Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan,* Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiayartanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p. 175

Dengan demikian, bila dihubungkan dengan kenyataan di atas, keberadaan sistem pendidikan Islam memerlukan pemikiran-pemikiran yang berwawasan ke depan melalui upaya-upaya nyata secara kontinue, karena konsep penyusunan UUSPN No. 2 tahun 1989 dan peraturan pemerintah yang mengiringinya membuka kesempatan bagi sistem pendidikan Islam untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu jika sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak mampu mengemban tugasnya, maka posisinya sebagai sub sistem pendidikan nasional sedikit demi sedikit akan terpinggirkan.

Dalam kerangka inilah, dukungan atas kalangsungan sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Ketiga lembaga pemegang tanggung jawab pendidikan tersebut mempunyai kekhusunan masing-masing dalam fungsi dan tugasnya, karena berkaitan erat dengan perkembangan usia dan kematangan anak didik. Tiap lembaga pendidikan tersebut terjalin hubungan yang reta, saling membantu dan mendukung dalam usaha memberikan pendidikan. Ketiga lembaga pendidikan tersebut diistilahkan sebagai "Tripusat Pendidikan".[30]

Meskipun keluarga berstatus lembaga pendidikan informal[31] ia merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak didik. Di sinilah, sikap keagamaan, akhlak, pola piker, tingkah laku social dan budaya benyak dibentuk oleh pendidikan dalam keluarga. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak didik selanjutnya.

Meskipun keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, namun belum dianggap cukup dalam membekali anak didik untuk dapat hidup wajar dalam kehidupannya. Oleh Karen aitu, keluarga menyerahkan anaknya ke sekolah agar sekolah mendidik anak sebaik-baiknya. Pendidikan di sekolah – yang biasanya disebut

---

[30] Azyumardi Azra, *Esei-esei Ineetlektual Muslim dan Pendidikan Islam,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998), p. 16

[31] Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasi secara struktural dan tidak mengenal sama sekali perjenjangan kronologis menurut tingkatan umum maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan. Lihat Soelaiman Joesoef dan Slamet Santoso, *Pengantar Pendidikan Sosial,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), p. 20

pendidikan formal[32] – diharapkan dapat menyempurnakan pendidikan anak, karena di keluarga ia tidak mendapatkan pendidikan secara sistematis dan standar umum. Sekolah memberi dan melengkapi pendidikan dengan pengajaran yang tidak didapat dalam keluarga.

Selain itu, ada juga lembaga pendidikan kemasyarakatan yang bisa terdapat dalam bentuk organisasi keagamaan, perkumpulan pemuda, remaja mesjid, majeis ta'lim, pusat keterampilan dan latihan, serta perkumpulan sosial lainnya. Semua lembaga seperti ini dapat difungsikan sebagai pengemban misi pendidikan Islam. Abdul Munir Mulkhan menyatakan bahwa "telah sejak lama disadari bahwa pendidikan di samping berfungsi sebagai alat pengembangan dna penyebarluasan ilmu pengetahuan, juga merupakan alat paling efektif (dalam penyebaran) suatu ideologi politik".[33] Hal senada dikemukakan oleh Muhammad Tolchah Hasan bahwa "ada keterakaitan antara lembaga-lembaga pendidikan dengan kepentingan-kepentingan politik, rezim, atau sekte.[34] Muhammad Abduh[35] pun, sebagaimana dikutip oleh A.L. Tibawi,[36] menyatakan bahwa pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk melakukan perubahan.[37]

Sebagaimana tujuan di atas, dalam kerangka inilah di Indonesia muncul pula organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Jam'yah al-Khair (1905), Persis (1923), Nahdlatul Ulama (NU, 1926), dan Al-washliyah (1930), yang mana, masing-masing organisasi sosial

---

[32] Dikatakan pendidikan formal, karena sekolah adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, dan alat-alat yang disusun secara eksplisit, sistematis dan distandarisasikan. *Ibid*, p. 61

[33] Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma ….,* p. 61. Kata-kata dalam kurang oleh penulis.

[34] Muhammad Tolchah Hasan, "Islam dan Transformasi Lembaga Pendidikan" dalam *Ulumuddin,* Nomor 1, Edisi Maret 1996, p. 52

[35] Muhammad Abduh (1849-1905 M) adalah seorang pembaharu dari Mesir yang pemikiran pembaharuannya ditekankan kepada upaya merespon tantangan yang dating dari Barat dan dunia modern yang merupakan bukti dari sikapnya yang kreatif dan proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah umat Isla. Lihat Abdul Kholik, dkk. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), pp. 181 – 195

[36] A.L. Tibawi atau lengkapnya Abd. Al-Latif Tibawi adalah seorang sejarawan – lebih tepatnya *Medievalist* – keturunan Arab Lebanom. *Ibid,* p. 317

[37] A.L. Tibawi, *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National systems,* (London: Luzac and Company Ltd., 1979), p. 69

keagamaan tersebut mencoba memajukan masyarakat yang terkebelakang, salah satunya lewat jalur pendidikan.

Tanpa bermaksud mengecilkan organisasi-organisasi yang lain dalam pengembangan pendidikan, NU misalnya, telah mempunyai banyak pondok pesasntren dan madrasah yang tersebar di plosok tanah iar, dan juga mempunyai sekolah-sekolah umum dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. NU membentuk *Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI) untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan membentuk Lembaga Pendidikan dan Ma'arif untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren.

Bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang ada di NU, baik itu pesantren, madrasah, sekolah, mupun perguruan tinggi akan dibahas pada sub bab-sub bab beriku ini.

1. Pesantren

Pesantren[38] merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki tradisi dalam rentang sejarah yang sangat panjang. Sejak masa kelahirannya[39] sampai dengan periode modern dewasa ini tetap eksis

---

[38] Perkataan pesantren berasal dari kata sendiri dengan awalan pe-dan akhiran-an yang berarti tempat tinggal para santri, menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata santri adalah orang yang mendalami agama Islam. Dengan demikian, pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia, untuk mendalami ilmu agama islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian atau disebut *tafaqquh fi al-diin* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. Lihat Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), p. 783, Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan,* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), p. 223, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* (Jakarta: LP3ES, 1994), p. dan Sudjoko Presodjo, et.al., *Profil Pesantren,* (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 6

[39] Ada bebarapa versi tentang kelahiran pesantren. menurut catatan Pigued dan De Graaf yang dikutip Martin Van Bruinessen, pesantren merupakan jenis pusat pendidikan Islam kedua setelah mesjid pada periode awal abad ke-16. Dalam laporan survey Belanda pertama mengenai pendidikan pribumi yang dilakukan pada tahun 1918, tercatat bahwa pesantren Tegalsari didirikan pada tahun 1742. Lembaga-lembaga pendidikan yang mirip pesantren dilaporkan terdapat

sebagai kekuatan moral keagamaan, sosial politik dan kultural. Dalam merespon berbagai variasi tantangan yang dihadapi, ia tetap *suvive* dalam kondisi apapun, mampu merespon berbagai perubahan tanpa merubah karakteristik dasar yang melekat pada dirinya.

Ada beberapa fungsi tradisional pesantren yang tetap bertahan, yaitu : 1) Sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, 2) Pemeliharaan tradisi Islam, 3) Reproduksi ulama.[40] Menurut Azyumardi Azra, pesantren cenderung lebih hati-hati dalam menjawab perubahan di sekelilingnya. Ia tidak tergesa-tergesa mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam modern sepenuhnya, tetapi menerimanya dalam skala yang sangat terbatas, sebatas melakukan penyesuaian yang mereka anggap akan mendukung kontinuitas pesantren itu sendiri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal.[41]

Dasarnya arus modernitas pendidikan Islam tidak dapat meluntur-kab sistem kelembagaan pesantren. Karena itulah pesatren masih tetap bertahan sampai sekarang. Di samping itu posisi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan lembaga ilmu, tetapi ia juga sebagai sebuah wadah pencipta dan pemelihara tradisi di sebuah tatanan kehidupan masyarakat.[42]

Dalam historitas perkembangan pesantren di Indonesia, di satu sisi menggambarkan adanya keunikan dinamika kultur dalam mensikapi keadaan dan merespon perubahan, di sisi lain tetap bertahan pada

---

di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Madiun dan Pronorogo (di mana Tegalsari berada) waktu itu memiliki pesantren terbaik. Di sanalah anak-anak dari pesisir utara melanjutkan pelajarannya. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat,* (Bandung: Mizan, 1994), p. 24

[40] Azyumardi Azra, “Pesantren, Kontinuitas dan Perubahan” sebuah pengantar dalam Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan,* (Jakarta; Paramadina, 1997), p. xxi

[41] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 101

[42] Abdul Munir Mulkhan, “Re-tradisi Intelektualitas Pesantren” dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk., *Religiusitas Iptek: Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 152

karaktristik khas pondok pesantren.[43] Mastuhu mengistilahkan hal tersebut sebagai pergumulan pesantren antara "identitas dan keterbukaan",[44] maksudnya, di suatu pesantren dituntut untuk menemukan dan menampilkan identitasnya kembali sebagai lembaga yang diselenggarakan untuk mendidik santri-santrinya agar menjadi orang yang taat menjalankan agamanya dan berakhlak mulia, serta sebagai lembaga pendidikan agama (*tafaqquh fi al-diin*), sosial keagamaan, dan penyiaran agama dengan orientasi ukhrawinya. Di pihak lain, ia harus terbuka bekerja sama dengan sistem-sistem yang lain di luar dirinya yang tidak selalu sepaham dengan dirinya.

Oleh karena itu, melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, K. H. A. Wahid Hasyim – yang pada waktu itu menjabat Menteri Agama – melakukan pembaharuan pendidikan Islam dengan menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Persaingan dengan madrasah modern dan sekolah-sekolah umum mendorong pesantren yang merupakan basis pendidikan NU mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.[45]

Lebih dari itu pesantren-pesantren semakin mengembangkan kelembagaan dan sistem pendidikannya untuk kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah, tetapi juga mendirikan SMP dan SMA.[46] Selain itu dikembangkan juga pendidikan keterampilan seperti komputer, fotografi, pertanian, pertukangan, elektronik, administrasi dan Bahasa Inggris.[47] Pengembangan ini

---

[43] Karakteristik khas pendidikan pesantren, di antaranya adalah pengajaran kitab Islam klasik sebgai inti pendidikannya, dan tanpa mengenal pengajaran pengetahuan umum. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi .....,* p. 41. Pesantren pada awal berdirinya merupakan pranata keagamaan tradisional yang terbaik guna mempersipakan pemuda yang sedang muncul dalam masyarakat. Lihat Zainin Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawan,* Terj. Sukarsi, (Jakarta: INIS, 1988), p. 35

[44] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* (Jakarta: INIS), p. 149

[45] Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 198

[46] Laporan Tim Kompas, "Pesantren: Dari Pendidikan Hingga Politik" dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik ....,* p. 130

[47] Hanun asrahah, *Sejarah ....,* p. 190

dilakukan dalam rangka menyesuaikan kelembagaan pesantren dengan kebutuhan masyarakat. Karena apabila tidak terdapat hubungan dengan kebutuhan masyarakat maka akan membawa kepada sikap frustasi karena apa yang telah dimiliknya tidak dapat difungsionali-sasikan dalam lingkungan kehidupan.

Oleh karena itu, setahap demi setahap pesantren telah menye-laraskan diri dengan cita-cita sistem pendidikan nasional. Sebelumnya pesantren telah mengalami disorientasi dalam kerangka pendidikan nasional. Artinya, pesantren telah kehilangan kemampuan untuk men-definisikan dan memposisikan diri dalam realitas sosial yang sedang menjalani perubahan sosial yang cepat.[48]

Abdul Munir Mulkhan menganggap, bahwa dari segi sosial-politik, ketergantungan pesantren terhadap pemerintah merupakan faktor melemahnya peran sosial-politik dunia pesantren.[49] Namun, dibukanya pesantren terhadap dunia luar, juga dianggap sebagai suatu perkem-bangan yang positif, baik oleh para pengurus NU maupun oleh pemerin-tah sekalipun dengan keuntungan yang berbeda.

Dalam hal ini, pemerintah tidak memaksakan pesantren menga-dakan modernisasi secara radikal, tetapi dengan membangkitkan inisiatif pesantren sendiri untuk bersikap responsive terhadap perkem-bangan masyarakat sekitar. Secara bertahap, akhirnya pesantren mampu menyesuaikan dan menempatkan diri pada posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional.

Di satu sisi, pesantren merupakan lembaga pendidikan luar seko-lah, karena pesantren tetap bertahan pada cirri khas tradisionalnya. Di sisi lain, bisa dikatakan sebagai pendidikan sekolah, karena pesantren juga menyelenggarakan madrasah dan sekolah.

---

[48] A. Malik Fadjar, " Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren" dalam Nursholish Madjid, *Bilik-bilik ….,* p. 116

[49] Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri,* (Yogyakarta: Sipress, 1992), p. 70

2. Madrasah

Tumbuh dan berkembangnya madrasah[50] di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya oragnisasi-organisasi sosial keagamaan pada saat itu seperti yang telah disebutkan di atas. Kegiatan masing-masing organisasi sosial keagamaan tersebut salah satunya berusaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia, baik itu melalui pesantren, madrasah, sekolah maupun perguruan tinggi. Usaha-usaha mereka tidak bisa dilepaskan dari intervensi pemerintah baik langsung maupun tidak langsung sebagai pengelola berbagai bidang kehidupan di Negara ini.

Perjalanan madrasah – yang secara harfiah identik dengan sekolah agama – mengalami perubahan-perubahan mengirinigi perjalanan perdaban bangsa Indonesia, walaupun sampai sekarang perubahan-perubahan tersebut tidak melepaskan nilai dan budaya asli yang mengikatnya, yakni budaya Islam.[51] Dalam kontek ini, madrasah NU menambah mata pelajaran ke NU-an dan mengajarkan pelajaran agama dengan nafas *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.*

Dalam sejarah perkembangan madrasah di Indonesia tercatat bahwa pemerintah pernah memperkalkan model Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada tahun 1958. Di tempuh selama delapan tahun, materi pelajaran terdiri dari mata pelajaran agama, umum dan keterampilan dalam bidang ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.[52] Tujuannya adalah agar selamat dari madrasah, anak didik mampu

---

[50] Madrasah berasal dari Bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam,* madrasah adalah *name of an institution where the Islamic science are studied.* Menurut SKB Tiga Menteri tahun 1975, madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping pelajaran umum. Lihat: Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu0jam al-Wasit,* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), p. 280. H.A.R. Gibb and H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam,* (Leiden: E.J. Brill, 1974), p. 300. Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia...,* p. 221, dan SKB Tiga Menteri tahun 1975 Bab I pasal 1.

[51] A.Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas,* (Jakarta: Mizan, 1998), p. 19

[52] Haidar Putera Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah,* (Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 2001), p. 76

berproduksi atau bertransmigrasi dengan swadaya dan keterampilan yang diperolehnya selama delapan tahun di MWB. Kurikulumnya merupakan keselarasan tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak dan akal. Perkembangan hati atau perasaan, dan perkembangan tangan atau kecekatan/keterampilan.[53]

Upaya pemerintah selanjutnya adalah mengerikan madrasah-madrasah swasta yang dikelola masyarakat, termasuk didalamnya madrasah NU, bauk yang berbentuk peribadi maupun organisasi. Melalui upaya inis ebnayak 123 Madrasah Ibtidaiyah telah dinegerikan dengan mata Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 183 Madrasah Tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam (MTsAIN), dan 42 Madrasah Aliyah dengan nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).[54] Dengan member status negeri ini, tanggung jawab pengelolaan memang menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control terhadap madarsah-madrasah tersebut menjadi lebih efektif.

Tanggapan masing—masing madrasah terhadap intervensi pemerintah ini bermacam-macam. Sebagian di antara mereka tunduk, sebagian lainnya bertahan dengan pengajaran yang benar-benar sesuai dengan golongan tradisionalis. Pada tahun 1991, para pengurus NU Jawa Timur mengeluhkan intervensi beberapa pengajar yang diangkat oleh Depertemen Agama, sedangkan di Jakarta sudah mulai terjadi tahapan transisi, dalam arti para pengajar yang diangkat sudah mulai menyesuaikan diri dengan ajaran NU.[55]

---

[53] Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975,* (Jakarta: LPIAK Balitbang Agama Depag, 1977), p. 62. Dalam MWB, kelas I sampai VI diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar 6 tahun (sekarang wajib belajar hingga 9 tahun). Sedangkan yang dua tahun lagi, yakni kelas VII dan VIII dimaksudkan sebagai kelas kemasyarakatan. Di kelas kemasyarakatan ini, para siswa diberi pengetahuan, watak dan keterampilan yang menjadikan mereka siap terjun ke masyarakat. Lihat A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam,* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), p. 93

[54] Dua madrasah swasta yang pertama dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 80 tahun 1967 adalah Madrasah Aliyah Al-Islam di Surakarta dan Madrasah Aliyah di Magetan. Lihat H. Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 141

[55] Andree Feillard, *NU Vis-a-vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), p. 311

Pada mada kemerdekaan, organisasi-organisasi sosial keagamaan memang terus *survive*, namun tidak memperoleh perhatian penuh dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan agama islam dibiarkan hidup keadaan yang sangat sederhana dan hidup apa adanya. Baru pada tahun 1975 perhatian pemerintah mulai tampak pada pembinaan madrasah dengan lahirnya SKB Tiga Menteri. Pengakuan lembaga pendidikan Islam dengan cirri khasnya baru dapat dilihat dengan lahirnya UUSPN No. 2 tahun 1989. Dalam undang-undang tersebyt pendidikan madrasah diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Agama RI No. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah, dan No. 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.[56]

SKB Tiga Menteri tersebut dikeluarkan dengan landasan adanya keinginan untuk mengintensifkan pendidikan umum di madarasah dan mengintensifkan pendidikan agama di sekolah umum.[57] Konsekuensinya, antara lain dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah. Madrasah menguikuti kurikulum nasional dan berbagai peraturan yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[58] Walaupun demikian, pada awal 1990-an, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Di Yogyakarta mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta pada madrasah-madrasah untuk tidak menerima intervensi pemerintah. Namun karena khawatir bantuan Negara akan dikurangi atau bahkan dihentikan, banyak di antara madrasah itu tetap mengikuti kemauan pemerintah.[59]

Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri, madrasah diakui setaraf dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Oleh karena itu tamatan madrasah tidka lagi hanya semata-mata bisa melanjutkan ke IAIN,

---

[56] Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam),* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1998), p. 226 - 368

[57] Depag RI, *Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren,* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1985), p. 11

[58] H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), p. 170

[59] Wawancara Andree Feillard dengan Musa Abdillah, Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DI Yogyakarta, 1991, dalam Andree Fellard, *NU.....,* p. 311

tetapi juga berhak untuk melanjutkan ke berbagai fakultas tinggi umum lainnya.

Untuk mereliasasikan SKB Tiga Menteri tersebut, dikeluarkan kurikulum madrasah tahu 1976 dan secara bertahap dilaksanakan mulai tahun 1978, lalu disempurnakan dengan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 untuk tingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah telah disempurnakan pula lewat SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987.

Realitas di atas menunjukkan bahwa madrasah telah mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Berbagai bantuan pemerintah dan kebijakan-kebijakannya terhadao madrasah (seperti pengangkatan guru dan kepala sekolah, perumusan kurikulum, dan penegerian madrasah), sedikit banyak melemahkan posisi NU dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikannya. Di sisi lain berkat benatuan pemerintah itu pula memperkuat kelangsungan hidup NU dan membuat citra pendidikannya menjadi lebih berarti.

3. Sekolah

Pada bagian terdahulu sudah diterangkan bahwa sekolah merupakan salah satu dari tripusat pendidikan. Sekolah menitik beratkan pada pendidikan formal, yakni prosedur pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa, ada guru, siswa jadual pelajaran, kurikulum, serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan lainnya.

Dalam UUSPN Bab IV pasal 10 disebutkan bahwa jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jenjang pendidikannya terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, selain itu dapat juga diselenggarakan pendidikan prasekolah.[60]

UUSPN No. 2 tahun 1989 secara tegas member peranan dan fungsi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan anak didik secara utuh,[61] dan mulai dikembangkan pendidikan sekolah yang

---

[60] Pendidikan Prasekolah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani anak didik sebelum mereka masuk Sekolah Dasar. Lihat Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), p. 37

[61] Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang

mampu berperan secara efektif dan efesien sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan kemampuan anak didik secara utuh. Inilah tantangan yang lahir dari tuntutan UUSPN khususnya terhadap pendidikan nasional.

Para pakar pendidikan beranggapan bahwa perubahan kurikulum di sekolah mutlak harus dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan terhadap perkembangan zaman.[62] Apalagi di era sekarang ini, era globalisasi[63] yang merupakan keharusan sejarah yang tidak mungkin dihindari, dengan segala manfaat dan mudharatnya. Sekarang ini masyarakat dituntut untuk menyiapkan SDM yang unggul yang terus menerus dapat *survevi* dalam masyarakat yang kometitif. Oleh karena itu pendidikan harus relevan denga kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Relevansi pendidikan dengan anak didik berkaitan dengan peran mereka dalam masyarakat.[64]

Beranjak dari problema di atas, NU sudah berusaha mengembangkan pendidikannya untuk menjawab tuntutan zaman tersebut. Selain menyelenggarakan sekolah umum di pesantren, NU juga menyelenggarakan sekolah-sekolah umum di luar pesantren dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. Walaupun dari segi kuantitas, sekolah NU boleh dibilang cukup besar, tapi dari segi kualitas bisa dikatakan masih merupakan pekerjaan besar untuk sampai ke sana.

---

beriman dna bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lihat Undang-undang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 4.

[62] T.M. Sulaiman, "Globalisasi Pendidikan untuk Tahun 200" dalam Slamet Riyadi dan Tasmiyan (Peny)., *Kumpulan Makalah Penunjang Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Tentang Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI* (Jakarta: Departemen Organisasi dan Kelembagaan ICMI, 1994), p. 662

[63] Era globalisasi pada dasarnya adalah era persaingan pasar bebas yang akan lebih banyak menampilkan kompetisi ukuran-ukuran kualiats produk barang dan jasa, yang di latar belakangi oleh dukungan kualitas manusia sebagai pelakunya. Lihat Anas Syahrul Alimi dan M. Fadhiliah Zaidie (ed.), *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia (Sebelum Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar, MS),* (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1999), p. 194

[64] Abdul Munir Mulkhan, "Visi dan Relevansi Demokratis Pendidikan Islam" dalam *Ulumuddin,* p. 36

Gus Dur sendiri mengakui bahwa dari segi jumlahnya pendidikan NU adalah yang paling besar, tapi sistemnya paling semrawut dan mutunya juga paling rendah.[65] Memang harus diakui bahwa NU sebenarnya telah terlambat memulai tradisi kualitatif dalam peneyelenggaraan pendidikannya. Berbeda dengan sekolah-sekolah Kristen misalnya yang telah memulai tradisi kualitatif semenjak zaman kolonial Belanda yang secara politis mereka memang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial.[66]

Walaupun sekolah-sekolah NU masih berusaha terus untuk mengejar kualitasnya, namun keberadaannya perlu diapresiasi karena upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka memajukan masyarakat yang masih memiliki keterbalakangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merupakan respon NU terhadap kemajuan dan tuntutan zaman melalui usaha pendidikannya.

4. Perguruan Tinggi

Para pimpinan dan pengelola perguran tinggi swasta kini dihadapkan pada tuntutan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang dijalankannya, karena pemerintah akan memformlakan tuntan itu dlaam bentuk ketentuan dan prosedur akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Di sisi lain, mereka dihadapkan pada adanya kecenderungan masyarakatan yang semakin menunjukkan gejala kekrtisannya dalam menilai posisi suatu lembaga pendidikan tinggi yang ada. Kini semakin banyak calon mahasiswa yang tidak lagi mempersoalkan apakah perguraan tinggi itu bergerensi atau tidak. Mereka juga tidak lagi memperdulikan fakultas atau program studi yang idmasuki itu sudah disamakan atau masih berstatus terdaftar.

Kecenderungan para calon mahasiswa kini yang penting adalah perguruan tinggi mana yang lulusannya dapat dengan mudah meme-

---

[65] *Bangkit,* No. 5 Juli-Agustus 1993, p. 5

[66] A. Malik Fadjar, "*Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Pendidikan"* dalam Ilyas, dkk. (ed), *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman,* (Yogyakarta: Kerja sama LPPI UMY, LKPSM NU dan PP Al-Muhsin Yogyakarta, 1994), p. 60

nangkan persaingan ketat di bursa persaingan kerja kelak. Kondisi semacam ini memaksa perguruan tinggi swasta untuk masuk ke dalam persaingan yang teramat ketat. Semakin kritisnya calon mahasiswa, mengandung makna semakin selektif mereka dalam menentukan perguruan tinggi atau fakultas atau jurusan mana yang mereka pilih.

Menurut Earl James McGrath – seorang Komisaris Pendidikan Amerika – salah satu fungsi pendidikan tinggi itu adalah membekali mahasiswa untuk memperoleh keterampilan yang dapat diaplikasikan di berbagai lapangan pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi sebagai prasartnya.[67] Oleh karena itu lembaga pendidikan tinggi harus mempunyai akuntabilitas yang tinggi, agar tidak terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat yang memilikinya. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan di masyarakat.

Menurut H.A.R Tilaar, kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan berupa fisik, dalam arti ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan serta kegiatan budaya dalam suatu masyarakat, tetapi juga kebutuhan moral dan etika serta agama yang hidup di masyarakat tersebut.[68] Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi tidak hanya mengarahkan dan memperluas kembali misinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi tetapi juga untuk mengembangkan moral dan budaya.[69]

Di kalangan NU, dunia perguruan tinggi masih merupakan suatu hal yang baru, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain seperti pesantren, madrasah dan sekolah. Baru setelah alumni perguruan tinggi dari kalangan NU hidup di tengah masyarakat, sehingga tumbuh keinginan untuk membuka perguruan tinggi-

---

[67] Fungsi lainnya, antara lain: mendorong mahasiswa untuk menyiapkan dan melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan; dan mendidik mahasiswa untuk dapat menampilkan kemampuan intelektual dan akuntabilitasnya pada semua aktivitas kehidupan. Lihat Earl James McGrath, *Education: The Wellsparing of Democracy,* (Alabama: University of Alabama Press, 1951), p. 88

[68] H.A.R. Tilaar, *Paradigma ….,* p. 111

[69] H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21,* (Magelang: Indonesia Tera, 1993), p. 178

perguruan tinggi. Di antara perguruan tinggi NU[70] yang cukup terkenal adalah Universitas Islam Malang (UNISMA),[71] Universitas Sunan Giri (UNSURI) Surabaya, Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, dan Insitut Agama Islam Tribakti Kediri.

Sebelum meletakkan posisi perguruan tinggi NU di Indonesia, Muhammad Tolchah Hasan menyatakan bahwa dalam merencanakan pendirian suatu perguruan tinggi digunakan tiga pilihan pendekatan, yaitu: *pertama,* dasar *social demands* (tuntutan masyarakat), di mana perguruan tinggi didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Dengan pendekatan ini, diberikan kesempatan yang luas bagi calon mahasiswa untuk memperoleh pendidikan. Pendekatan ini lebih bersifat akomodatif dan pemerataan, tetapi kurang memperhatikan masalah relevansi dan efesiensi. *Kedua,* dasar *manpower planning* (kebutuhan ketenagaan) atau *supply demands.* Prioritasnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. *Ketiga,* dasar *efficiency invest*. Di sini pendirian perguruan tinggi (juga jenjang pendidikan dasar dan menengah) dipandang sebagai instrument produksi, membutuhkan investasi yang besar, karenanya harus *profitable.*[72]

Beranjak dari tiga pendekatan tersebut. Muhammad Tolchah Hasan melihat bahwa di kalangan perguruan tinggi NU sebagai besar masih menggunakan pendekatan yang pertama saja, yakni *social demands*. Belum banyak yang memperhatikan pendekatan kedua dan ketiga. Oleh karena itu, dalam waktu yang cepat diharapkan perguruan tinggi NU segera melakukan pembenahan-pembenahan yang serius.

---

[70] Beradasarkan hasl Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang diselenggarakan tanggal 26-28 Nopember 1993 di kampus Universitas Islam Malang (UNISMA), bahwa jumlah PTNU di seluruh Indonesia tercatat sebayak 84 buah. Lihat *Aula* Nomor 06/Tahun XVII/Juni/1995.

[71] Universitas Islam Malang yang secara struktual di bawah Pimpinan Pusat LEmbaga Pendidikan Ma'arif NU ini adalah sosok contoh perguruan tinggi NU. Dalam salah satu Keputusan Konferensi Besar NU 1992 di Bandar Lampung, UNISMA adalah salah satu perguruan tinggi NU yang terpilih sebagai percontohan bagi pengembangan perguruan tinggi di NU. lihat *Bangkit*, p. 15

[72] *Ibid.,* p. 39

B. Perkembangan Pemikiran Pendidikan di Lingkungan NU

Era golbalisasi yang menjadi keniscayaan sejarah kemanusiaan, mau tidak mau harus diantisipasi oleh NU. Kemampuan untuk menguasai ilmu pengetehauan dan teknologi tidak bisa dielakkan, karena islam tidak mengenal parsialitas. Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi warga NU harus bersifat holistic, maksud-nya pengausaan ilmu pengetahuan dna teknologi harus disertai dengan pemahaman dan kearifan terhadap hubungan-hubungan eksistensial antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitarnya.

Beranjak dari pemikiran di atas, sekolah-sekolah yang masuk kategori pendidikan umum juga dikembangkan NU. NU tidak hanya memiliki pondok pesantren dan madrasah, tetapi juga memiliki sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi menurut paham yang mereka anut, yakni *ahlu al-sunnah wa-aljama'ah.* Langkah ini diambil NU sebagai respon terhadap tuntutan zaman dan sebagi tanggung jawab moral untuk menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia secara umum dan sumber daya manusia warganya secara khusus agar memiliki keunggulan yang kompetitif dan bisa *survive* di tengah persaingan hidup yang semakin ketat.

Oleh karena itu, selain tetap pada teradisi awalnya, yakni mengembangkan pesantren dan madrasah, NU juga mengembangkan sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi menurut paham yang mereka anut.

Pada awal pertumbuhan organisasi NU, pesantren merupakan satu-satunya basis lembaga pendidikan NU. Baru ketika dinamika ilmiah Islam di Indonesia digerakkan yang ditandai dengan munculnya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun 1950, baik negeri maupun swasta, adanya proyek Madrasah Wajib Belajar (MWB) tahun 1958, dan adanya SKB Tiga Menteri tahun 1975, maka di pesantren diselenggarakan juga sistem madrasah yang sebelumnya tidak ada.

Di samping menyelenggarakan madrasah, ada pula sebagian pesantren yang menyelenggarakan sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Menurut Abdurrahman Wahid, adanya sekolah di lingkungan pesantren akan memecahkan ledakan usia sekolah, di

samping itu akan mendorong pertumbuan siswa/santri baru di pesantren.[73]

Pernyataan tersebut tampaknya tidak berlebihan, karena dengan diselenggarakannya sekolah di pesantren, mendorong masyarakat untuk memasuki sekolah di lingkunga pesantren tersebut. Dengan kata lain, ada nilai tumbuh bagi pesantren tersebut, yakni tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga memberikan pendidikan umum. Dengan demikian ada pertambahan anak didik/santri di pesantren yang berarti pula pertumbuhan jumlah anak didik yang berpendidikan formal di Indonesia secara keseluruhan.

NU berpendangan, bidang pendidikan merupakan bagian penting yang ikut ambil bagian dalam membangun masyarakat, karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemberian atau pembekalan pengetahuan, melainkan juga pembentukkan karakter bangsa.[74] Oleh karena itu, NU berusaha mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Dunia perguruan tinggi masih merupakan suatu hal yang baru di kalangan NU jika dibandingkan dengan lmbaga pendidikan yang lain seperti pesantren, madrasah dan sekolah. Baru ketika sumber daya manusia tersedia, yakni setelah memiliki banyak sarjana dengan jenjang studi yang memungkinkan untuk serius mengelola perguruan tinggi, NU mulai bangkit memikirkan dan mengembangkan perguruan tinggi.

Sebagaimana telah diungkapkan pada sub bab sebelumnya, Muhammad Tolchah Hasan melihat bahwa pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar di lingkungan NU sebagian besar masih berorientasi pada *social demands*, di mana lembaga pendidikan didirikan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Belum banyak memperhatikan orientasi *manpower palnning* untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan orinetasi *efficiency invest* yang dipandang sebagai instrument produksi.

---

[73] Depag RI., *Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren,* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1985),. P. 15

[74] *Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2001.* (Jakarta: Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, 2001), p. 117

Oleh karena itu, paelu ada pemikiran kembali pendidikan NU. Muhammad Tolchah HAsan menawarkan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam menata kembali pendidikan NU, yakni : 1) membentuk forum komunikasi pendidikan di kalangan NU, tujuannya adalah saling memberikan pengalaman, temuan-temuan lapangan, *in put* informa-tive, dan kegiatan bersama. Pembentukan forum ini juga diusulkan oleh K. H. A. Hasyim Muzadi, agar Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif mengadakan munas kepala sekolah dan perguruan tinggi NU se-Indonesia, 2) menyiapkan inttervensi wawasan dan intervensi nilai, dalam arti memberikan masukan wawasan transformative dan nilai inovatif kepada lembaga-lembaga pendidikan NU, agar lebih mampu mengaktualisasikan potensinya, 3) membuat pilot proyek, terutama satuan pendidikan yang dipandang sudah mapan, sebagai pusat pengembangan.[75]

Demikianlah, pemikiran pendidikan Nu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan agar terwujud organi-sasi NU yang solid dengan lembaga pendidikan dan perkembangan pemikiran pendidikannya yang dinamis.

C. Sistem dan Institut Pendidikan NU

Dalam usaha mefokuskan perhatian di bidang pendidikan, NU membentuk Lembaga Pendidikan Ma'arif dan *Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI) dalam struktur organisasinya. Lembaga Pendidikan Ma'arif bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren. Sementara RMI bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren.

Sebagian pesantren masih memakai sistem tradisional, dalama arti hanya mengajarkan kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sebagian yang lain sudah memakai sistem modern, dalam arti sudah menyelenggarakan pendidikan formal, baik madrasah maupun sekolah.

Jika membagi jalur pendidikan dibagi menjadi jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, maka pesantren bisa

---

[75] *Bangkit,* p. 12

dikategorikan sebagai pendidikan luar sekolah bila dilihat dari segi sistem tradisionalnya, namun bisa juga dikategorikan sebagai pendidikan sekolah bila dilihat dari segi penyelenggaraan sistem madrasah dan sekolah.

Jalur pendidikan sekolah atau disebut pendidikan formal ini ditangani oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif. Jalur pendidikan sekolah yang terdapat di NU adalah madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Jalur pendidikan sekolah ini memiliki jenjang, yakni : 1) jenjang pendidikan dasar, seperti MI/sD dan MTs/SLTP, 2) jenjang pendidikan menengah, seperti Ma, SMU, dan SMK, dan 3) jenjang pendidikan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, institute, dan akademi.

Idenya lembaga pendidikan formal tersebut mempunyai sistem dan kurikulum yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, namun selama ini sistem dan kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan formal tersebut adalah sistem dan kurikulum pemerintah yang ditambah dengan mata pelajaran ke-NU-an.

Keadaan tersebut merupakan konsekuensi UUSPN yang mengharuskan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional. Di samping itu belum ada keberanian dari para tokoh NU untuk membuat dan melaksanakan suatu sistem dan kurikulum tersendiri untuk lembaga pendidikannya. Padahal sumber daya manusianya sudah mulai mendukung, namun karena untuk melakukan perubahan tidak hanya bermodalkan keberanian saja, tetapi juga harus didukung oleh model dasar lainnya, maka untuk menuju kea rah dimaksud masih dalam upaya pemikiran dan penataan di segala bidang.

Selain menyelenggarakan jenjang pendidikan di atas, NU juga menyelenggarakan pendidikan prasekoalh (TK) yang dilaksanakan oleh Muslimat NU. Muslimat NU merupakan badan otonom yang menghimpun anggota perempuan NU. yang dikembangkan, tapi sudah pada pengembangan institutnya. Melihat fenomena tersebut, NU kelihatannya berusaha memodernisasikan dunia pendidikannya setahap demi setahap.

Lembaga Pendidikan Ma'arif, sebagai salah satu lembaga yang ada di organisasi NU, dibentuk menangani masalah pendidikan tersebut, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren.

Eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan sebuah perangkat organisasi di tubuh NU yang keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NU *an sich*, di mana pembentukkan dan penghapusan lembaga-lembaga yang ada ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan NU.

Sayangnya, pengembangan keilmuan yang menjadi prasyarat untuk membenahi kualitas SDM umat agar terabaikan, betapapun usaha penyediaan sarana fisik di berbagai lembaga pendidikan cukup digalakkan, Cuma karena tidak diimbangi oleh kematangan agenda pemberdayaan yang lebih sistematis dan berjangka panjang, program peningkatan pembangungunan infrastruktur tersebut akhirnya tidak berdayaguna tinggi. Begitu pula di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang sebagian pengelolanya kurang profesional dalam bidang pendidikan itu sendiri.[76]

Menurut Andree Feillard, "pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi para aktifis pada kegiatan politik menjadi penyebab lemahnya sistem yang sebagian pengelolanya kurang profesional dalam bidang pendidikan itu sendiri.

Menurut Andree Feillard, 'pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi para aktifis pada kegiatan politik menjadi penyebab lemahnya sistem pendidikan NU.[77] adapun H. A. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kegagalan pemenuhan target pengelolaan tersebut dikarenakan dua kemungkinan, yaitu : *pertama*, lemahnya manajemen yang berujung pada stagnasi atau bahkan kebangkrutan secara perlahan. *Kedua,* ketidakjelasan porsi NU yang mempertegas adanya ikatan kepemilikan atau setidaknya koordinatif keorganisasian. Hubungan koordinatif keorganisasian yang kabur merupakan variasi lain dari ketidak jelasan tersebut yang kebanyakan menyelimuti pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Di satu sisi tidak sedikit dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut yang memiliki kualitas bagus dan secara mandiri berhasil mengembangkannya sesuai dengan tuntutan profesionalitas

---

[76] H. A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1994), p. 28

[77] Andree Feillard, *NU ….,* p. 305

manajemen. Tanpa meninggalkan nuansa kepesantrenan yang mengental dalam komposisi kurikulumnya. Lembaga-lembaga pendidikan ini juga menawarkan berbagai kelebihan yang menjadi produk andalan lembaga-lembaga pendidikan swasta maupun negeri pada umumnya. Sementara di sisi lain, jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang juga menginduk pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri.[78]

[78] H. A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama ....,* pp. 37-9

BAB III
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF DALAM DINAMIKA PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

A. Posisi Lembaga Pendidikan Ma'arif dalam Struktur Organisasi NU

PNBU – dalam muktamarnya yang ke-30 di Libroyo Kediri – mengungkapkan bahwa satu kelemahan NU adalah adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara program yang telah dirumuskan dengan pelaksanaan program tersebut. Kesenjangan itu berkaitan dengan lemahnya sikap profesionalitas dan penguasaan manajemen organisasi, tidak menguasai konsep operasional dan jalannya kegiatan, serta kuatnya sikap pengkultusan kepada seseorang (yang karismatik)[79] di kalangan pengurus.[80]

---

[79] Karisma berasal dari kata Yunani yang berarti karunia diinspirasi Ilahi (*divinely inspired gift*), seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat atau memprediksi peristiwa-peristiwa di masa dating. Ahli sosiolog Max Weber telah menggunakan istilah tersbut untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang didasarkan bukan atas kondisi atau kewenangan, namun atas persepsi para pengikut bahwa pimpinan tersebut dikaruniakan dengan kemampuan yang luar biasa. Menurut Weber, karisma terjadi bilamana terjadi satu krisis sosial, yang ada krisis itu, seorang pemimpin dengan kemampuan pribadi yang luar biasa tampil dengan sebuah visi yang radikal yang member suatu pemecahan terhadap krisis tersebut, dan pemimpin tersebut menarik perhatian para pengikut yang percaya pada visi itu dan merasakan bahwa pemimpin tersebut sangat luar biasa. Lihat

Walaupun demikian, NU sebagai organisasi[81] sosial yang bergerak di bidang keagamaan atau organisasi keagamaan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tetap berhasrat mempertahankan kepemimpinannya di tangan ulama. Hasrat tersebut dirumuskan dengan membuat struktur organisasi[82] yang terdiri dari Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah.

Mustasyar (penasihat) biasanya terdiri dari kyai-kyai sepuh yang kegiatannya lebih banyak member nasihat jika dirasa ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan oleh para kyai sepuh tersebut. Syuriah (semacam lembaga legislative) – yang juga terdiri atas kyai, namun sudah ada beberapa tokoh muda, bahkan beberapa ssarjana yang bergabung – merupakan pimpinan tertinggi organisasi yang berfungsi menentukan arah kebijaksanaan NU dalam melakukan usaha-usaha dan tindakan mencapai tujuan organisasi, membimbing, mengendalikan, dan member koreksi terhadap semua perangkat organisasi agar pelaksananaa program berjalan di atas ketentuan organisasi. Tanfidziyah (semacam lembaga eksekutif) yang didominasi oleh para intelektual, merupakan lembaga pelaksana program NU, setelah digariskan oleh Syuria. Apabila Tanfidziyah hendak mengambil keputusan, maka keputusan itu harus berlingkup di bawah rambuprambu yang ditetapkan oleh syuriah. Tanfidziyah inilah yang mengemban semua kegiatan yang bersifat sosial. Tuntutan warganya dan tantangan problem zaman akan langsung di bawah koordinasinya.[83]

Gary Yukl, *Kepemimpinan dan Organisasi,* Terj. Yusuf Udaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1998), p. 268

[80] PBNU, *Rancangan Materi Program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1999-2004,* (Jakarta: Panitia Muktamar XXX NU, 1999), p. 23

[81] Organisasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam cara yang testruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasara. Lihat James A.F Stoner, dkk., *Manajemen,* Terj. Alexander Sindoro, Jilid 1, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), p. 6

[82] Suatu Struktur Organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Lihat Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi,* Terj. HAdyana Pujaatmaka, Jilid 2, (Jakarta: Prehallindo, 1996), p. 166

[83] Saifullah Ma'sum, "Faktor Kepemimpinan dalam Tanfidziyah dan Syuriyah" dalam M. Fajrul Falaakh, *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Prees, 1999) p. 49. Lihat

Lembaga Tanfidziyah inilah yang menggerakkan roda organisasi, karena itu ia cenderung lebih cepat berproses di dalam arus perubahan. Perangka-perangkat organisasi yang dimilikinya sebagai pelaksana organisasi mendukung gerak langkah tersebut, ditambah lagi oleh aktivitas Tanfidziyah yang lebih aktif dan rutin dibandingkan dengan aktivitas Syuriah.

Perangkat-perangkat organisasi NU tersebut adalah Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom. Lembaga adalah “perangkat departementasi organisasi NU yang befungsi sebagai pelaksana kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu”.[84] Terdapat empat belas lembaga yang ada di organisasi NU, salah satunya adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif yang akan dibahas lebih rinci pada bab IV.[85] Lajnah adalah “erangkat organisasi NU yang melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus”.[86] Sedang Badan Otonom adalah “perangkat organisasi Nu yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan.[87]

Perangkan atau depertementasi di organisasi NU merupakan pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja atau usaha menurut fungsi

---

juga Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926,* (Jakarta: Erlangga, 1992), p. 36, dan Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar,* (Yogyakarta:LKiS, 2000), p. 4

[84] Anggaran Rumah Tangga NU. Bab V, pasal 15

[85] Lembaga-lembaga lainnya, seperti Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga Sosial *Mabarrot* NU (LS *Mabarrot* NU), Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU), *Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah* (RMI), Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU), *Haiah Ta’mir al-Masajid* Indonesia (HTMI), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam), Lembaga Seni Budaya NU (LSBNU), Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja NU (LPTKNU), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU), Lembaga Pencak Silat (LPS), dan *Jam’iyyah al-Qurra wa al-Hufadz, Ibid.*

[86] Terdapat lima buah Lajnah, yakni Lajnah *Falakiyah*, Lajnah *Ta’lif wa al-Nasyr,* Lajnah *Auquf* NU, Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah, dan Lajnah *Bahts al-Masail al-Diniyah. Ibid.,* p. 130

[87] Terdapat tujuh buah Badan Otonom, yakni *Jam’iyyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah al-Nahdliyyah,* Muslimat NU, *Fatayat* NU, Gerakan Pemuda Anshor, Ikatan Putera NU (IPNU), Ikatan Puteri-puteri NU (IPPNU), Ikatan Sarjana NU (ISNU). *Ibid.,* p. 131

yang dijalankan. Adanya perangkat tersebut memudahkan perkoor-dinasasian dalam struktur organisasi. Lembaga yang secara khusus membidangi pendidikan dan pengajaran selain pondok pesantren adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ditingkat pusat dibentuk pada tanggal 21 Sya'ban 1380 H/7 Februari 1961 M.

Dengan demikian. Posisi Lembaga Pendidikan Ma'arif adalah salah satu perangkat atau departementasi Tanfidziyah dalam struktur organisasi NU. oleh kaena itu, segala bentuk kegiatan pendidikan dan pengajaran harus dipertanggung jawabkan kepada Lembaga Tan-fidziyah di tingkat keorganisasian masing-masing, seperti tingkat pusat, tingakt wilayah, tingkat cabang, tingkat Majelis Wakil Cabang, dan tingkat ranting.

B. Fungsi Lembaga Pendidikan Ma'arif

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan salah satu perangkat atau depertementasi dalam struktur organisasi NU. Sebagai salah satu perangkat organisasi NU, Lembaga Pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non for-mal, selain pondok pesantren.[88]

Dengan demikian Lembaga Pendidikan Ma'arif befungsi melak-sanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran baik di lembaga pendidikan formal, seperti di madrasah, sekolah dan per-guruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan non formal, seperti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Salah satu kebijakan NU tersebut adalah mengupayakan terselenggaranya pentransformasian ajaran *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* di lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Selain itu, Lembaga Pendidikan Ma'arif dimaknai sebagai instru-ment organisasi yang memiliki makna dan fungsi keseimbangan (*equi-librium*) di saat PBNU mulai bergeser ke dunia politik. Di sinilah fungsi Lembaga Pendidikan Ma'arif menjaga keseimbangan agar NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan.[89]

---

[88] Anggaran Rumah Tangga NU. Bab V, pasal 15. Pondok pesantren ditangani tersendiri oleh *Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI).

[89] "Sambutan Ketua Tanfidziyah PBNU dalam dalam Acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Jakarta tanggal 14 Februari 2011", dalah

Pembentukan perangkat organisasi NU tersebut bisa dilaksanakan di tingkat pusat, wilayah, cabang, Majelis Wakil Cabang (MWC), dan ranting disesuaikan dengan kebutuhan program di masing-masing tingkat organisasi tersebut.

Dengan demikian, setiap warga NU yang mampu dalam bidang financial, tenaga pengajar, sarana prsarana, dan komponen pendidikan lainya dapat ikut serta mendirikan madrasah, sekolah, atau perguruan tinggi di daerah masing-masing dan diberi kesempatan untuk mendaftarkan atau bergabung dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif bersama-sama dewan Pembina madrasah/sekolah/perguruan tinggi tersebut menetapkan kepala madrasah/sekolah/perguruan tingginya.

C. Peranan Lembaga Pendidikan Ma'arif

Keberhasilan Islam menembus jantung kehidupan masyarakat Indonesia bukan berarti menghilangkan sama sekali akar lama yang bersumber dari tradisi atau budata setempat. Pergumulan Islam dengan nilai budaya setempat menuntut adanya penyesuaian terus menerus tanpa harus kehilangan ide salinya sendiri. Demikianlah penghadapan Islam dengan realitas sejarah perkembangannya, memunculkan realitas baru, tidak saja diakibatkan pergumulan internalnya sendiri dalam menghadapi tantangan yang harus dijawab, tetapi juga keterlibatannya dalam proses sejarah sebagai pelaku yang ikut menentukan keadaan zaman.[90]

Beranjak dari pernyataan di atas, organisasi NU merupakan salah satu wujud dari fenomena di atas. Dipelopori oleh ulama yang berpusat di pesantren-pesatren yang memiliki kesamaan pandangan, sikap, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam yang berakar pada tradisi keilmuan dan kesenimbungan menelusuri mata rantai historis, yaitu *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.* Kesamaan tersebut melembaga dalam sebuah wadah dan sebagai pengejawantahan rasa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi umat dan warganya.

Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif NU 2001, (Jakarta: Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, 2001), p. xvi

[90] Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia,* (Jakarta: Tintamas, 1974, pp. 3-8

Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar, menumbuhkan solidaritas dan integritas yang kuat, menjadikan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang berpengaruh di Indonesia selama bertahun-tahun.[91]

Gagasan yang pertama kali muncul ketika NU dibentuk bukanlah dari wawasan politik, melainkan dari wawasan politik, melainkan dari wawasan sosial keagamaan. Motif non politik ini terus menjiwai kehidupan organisasi. Motif tersebut dengan sendirinya melekat dan menyatu pada dirinya yang menjadi cirri khas[92] dalam menapaki kehidupan beragama. Baru lima belas tahun kemudian ia terlibat dalam gerakan politik.[93]

Wawasan sosial keagamaan tersebut terlihat jelas pada anggaran dasar formal (*statute*) NU yang pertama di buat pada muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928. Atas dasar anggaran dasar tersebut, NU diberi status badab hokum (*rechtspersoonlijkheid*) oleh pemerintah Belanda pada 6 Februari 1930.[94]

---

[91] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* (Jakarta: LP3ES, 1994), p. 4

[92] Ciri khas NU, yang membuatnya berebda dengan organisasi sejenisnya adalah paham dan tradisi keagamaan yang spesifik, yakni Islam *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah,* yang sering juga disebut kelompok tradisionalisme di kalangan Islam. Di kalangan NU, khususnya bagi para pengurus penguasaan terhadap wacana keagamaan dan pengetahuan keagamaan *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* dengan segenap tradisinya, merupakan barometer bagi kesalehan dan kewibaan seseorang. Tradisi keagamaan itu merupakan tanggung jawab (*fardlu 'ain*) bagi seluruh *nahdliyyin,* dan diturunkan dari generasi ke generasi sehingga tradisi keagamaan tersebut terjaga. Lihat PBNU, *Rancangan …,* (Jakarta: Panitia Muktamar XXX NU, 1999), p. 20

[93] Orientasi politis mulai berkembang di kalangan NU, ketika sejumlah tokoh muda memegang pimpinan Tanfidziyah sejak akhir dasawarsa tiga puluhan. Mahfudh Shiddiq, Abdullah Ubaid, M. Ilyas dan A. Wahid Hasyim adalah eksponen yang cenderung menggalang kesatuan gerak dengan kelompok-kelompok muslim lain di luar NU. apalagi waktu itu telah berlangsung polemic dan perdebatan tentang dasar Negara, yang akan ditumbuhkan di bumi nusantara, karena keyakinan semakin dekatnya saat kemerdekaan dicapai. Lihat K. H. M.A. Sahal Mahfudh, "Kata Pengantar" dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis ….,* pp. xiv-v

[94] Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi; Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta: LKiS, 1994), p. 41

Anggaran dasar tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan NU mengembangkan ajaran-ajaran Islam *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* dan melindunginya dari penyimpangan kaum pembaharu dan modernis.[95] Doktrin *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* yang merupakan tradisi keilmu-agamaan itu berpangkal pada tiga buah panutan inti, yaitu 1) Mengikuti paham Al-Asy'ari[96] dan Al-Maturidi[97] dalam bertauhid, 2) Mengikuti salah satu mazhab empat (Syafi'I, Maliki, Hanafi,

---

[95] Kaum pembaharu menolak sikap taqlid kepada kitab-kitab skolastik klasik dan menganjurkan reinterpretasi terhadap sumber pokok Islam, al-Quran dan Hadits. Mereka mengantuk banyak kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional, seperti ritual untuk orang yang sudah meninggal, pemujaan para wali dan ziarah ke makam-makam serta berbagai unsure ibadah. Semua kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional ini mendapat legitimasi dalam kitab-kitab klasik, tetapi dianggap kaum pembaharu sebagai penambahan belakangan. Dalam pandangan mereka, praktek-praktek tersebut merupakan bid'ah dan karena itu diharamkan. Kaum tradisionalis justru membalikkaan tuduhan tersebut, dengan menyatakan gagasan-gagasan dan praktek-praktek yang dianjurkan kaum pembaharu sebagai bid'ah. *Ibid,* p. 43

[96] Nama lengkapnya Abu Hasan al-Asy'ari (W. 913 M/300 H) adalah salah seorang ulama yang menetapkan ajaran Islam Sunni yang menafsirkan secara tepat teologi dan keimanan Islam. Di antara banyak ulama yang mengembangkan system yurisprudensi dalam golongan Islam Sunni, ia mengikuti pandangan Muhammad al-Syafi'I (W. 819 M/204 H), yang hampir jadi ciri universal kaum muslimin Sunni di Asia Tenggara. Ia mengisyaratkan dengan kuat bahwa kaum muslim yang mendukung versi Islam modernis berarti berada di luar kubu mazhab Syafi'i. Lihat Howard M. Federspiel, "Daya Tahan Kesarjanaan Muslim Tradisionalis: Analisis atas Karya-karya Sirajuddin Abbas" dalam Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia,* Terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998), p. 190

[97] Nama Lengkapnya Abu Manshur al-Maturidi (W. 944 M/333 H. di Samarkand). Sezaman dengan Al-Ays'ari, namun tidak saling mengenal. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dengan Al-Asy'ari , khususnya berkenaan dengan teori tentang kebebasan manusia (Ia mengajarkan kebebasan manusia yang lebih besar daripada Al-Asy'ari). Ia dianggap sebagai pahlawan paham Sunni, dan system Ilmu Kalamnya dipandang sebagai "jalan keselamatan" bersama dengan system Al-Asy'ari. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan,* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), p. 209

dan Hanbali)[98] dalam bdang fiqh, 3) Menikuti cara yang ditetapkan Al-Junaid al-Baghdadi[99] dalam bertarekat atau bertasawuf.[100]

Tradisi keilmu-agamaan tersebut diturunkan dari generasi ke genarasi melalui upaya pendidikan. Pendidikan di NU selalu ditingkatkan, tetapi bahan-bahan pelajarannya harus diseleksi terlebih dahulu dari gagasan-gagasan kaum pembaharu.[101] Oleh Karen itu, NU membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah pendidikan, yakni Lembaga Pendidikan Ma'arif yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren.

Pada bab dua telah dinyatakan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan upaya mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tetapi ia juga merupakan sarana yang efektif untuk mentransformasikan ide-ide, doktrin-doktrin, atau nilai-niali yang melandasi lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu keberadaan Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan suatu sarana dan wadah bagi NU untuk mentransformasikan dan melestarikan nilai-nilai yang ada di NU.

---

[98] Dalam memegang satu mazhab, NU lebih menekankan pada mazhab Syafi'I, namun menurut pandangan Ahmad Qodri A. Azizy, NU lebih berafiliasi pada mazhab Syafi'iyah bukan Syafi'i-nya sendiri. Menurutnya hasil keputusan *baths al-masa'il al-diniyah* (pembahasan masalah-masalah agama) Syuriyah NU jarang sekali – untuk tidak mengatakan tidak pernah – merujuk langsung kitab-kitab karya Imam Syafi'I sendiri, sehingga terkadang putusan tersebut justru bukan pendapat Imam Syafi'I yang *brilliant*. Lihat Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam ….,* (Yogyakarta: LKiS, 2000), p. 12

[99] Nama Lengkapnya Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Khazzaz al-Nahwandi (W. 910 M/298 H) dilahirkan di Baghdad tanpa diketahui secara pasti tahun kelahirannya. Ajaran tasawuf Al-Junaid bertolak dari dasar dan penegakan syariat secara tegar dan tangguh. Hal itu tampak jelas dalam kehidupan dan pelajaran-pelajaran yang diberikannya. Tasawuf baginya tidak lain adalah berbudi pekerti yang baik dan meninggalkan budi pekerti yang buruk. Baik buruknya sesuatu diukur dengan syariat, karenanya tasawuf harus berdasar pada syariat itu sendiri. Tasawuf yang meninggalkan syariat adalah tercela dan tidak bisa diikuti. Lihat H.M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), p. 96, dan Farid al-Din Attar, *Muslim Saints and Mystics,* Trans. A.J. Arberry, (London: Reutledge & Kegan Paul Ltd., 1966), p. 199

[100] Miftahuddin, "Melacak Jejak "Kebengalan" Sang Pendekar" dalam M. Fajrul Falaakh, *Membangun ….,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), p. 126

[101] Martin Van Bruinessen, *NU ….,* p. 43

Karaktristik NU ditanamkan secara merata dan seragam pada semua madrasah/sekolah yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif sehingga menjiwai para alumninya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU menetapkan kurikulum yang disebut "Kurikulum Ma'arif Nahdlatul Ulama Tahun 1980", yang merupakan hasil Diskusi Terbatas Kurikulum Ma'arif tanggal 18 s/d 20 Mei 1979. Sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan kurikulum tersebut adalah :

"1. Agar sekolah-sekolah/madrasah-madrasah Ma'arif menggunakan kurikulum yang bertahap menuju kurikulum standar.
2. Agar tujuan-tujuan umum pendidikan Ma'arif dan tujuan institusional pendidikan Ma'arif menjadi jelas, sehingga setiap guru dan petugas pendidikan lainnya benar-benar memahami serta mendalami setiap tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman dan pendalaman tujuan tersebut menjadi pedoman utama bagi kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk merencanakan proses belajar mengajar.
3. Agar anak didik dapat mengikuti ujian persamaan/ujian yang diadakan oleh Negara serta mempermudah lulusan yang akan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.
4. Agar materi pelajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan ke-NU-an, yang masing-masing merupakan disiplin bidang studi tersendiri, lebih mudah dapat berkembang dan tertanam pada anak didik."[102]

Melihat sasaran yang ingin dicapai di atas, terliha ada upaya untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada di tubuh NU melalui lembaga-lembaga pendidikannya sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Di sinilah peranan Lembaga Pendidikan Ma'arif melalui lembaga-lembaga pendidikannya melestarikan nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang ada di NU.

Di samping itu, eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif turut berperan dalam menghidupkan dan mengkokohkan lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada, baik madrasah, sekolah atau perguruan

---

[102] *Kurikulum Sekolah dan Madrasah Lembaga Pendidikan Ma'ari,* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1982), p. 2

tinggi. Di mana sebelumnya, lembaga-lembaga pendidikan tersebut keberadaannya pun tidak terperhatikan dengan baik. Setelah Lembaga Pendidikan Ma'arif terbentuk dan berjalan degan baik, lembaga-lembaga pendidikan itu pun mulai bangkit seiring dengan lancarnya hubungan intern antar lembaga-lembaga pendidikan dan hubungan ekstren yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif seperti hubungan dengan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.

BAB IV
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Pembentukkan Lembaga Pendidikan Ma'arif

Eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya yaitu NU DIY. Hal ini karena Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY merupakan salah satu perangkat keorganisasiannya. NU DIY berdiri tahun 1931, di kelurahan Wonokromo, Kecamatan Plaret, Kabupaten Bantul oleh K. H. Imam (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Imam Wonokromo, sekaligus Ketua NU DIY pertama). Pendirian tersebut disetujui oleh K. H. Wahab Hasbullah.[103]

Sebagaimana NU di daerah-daerah lain, NU DIY juga memiliki program-program pokok, yaitu : 1) bidang pendidikan, 2) bidang ekonomi, 3) bidang *mabarrat/*sosial, dan 4) bidang da'wah.[104] Program-program pokok tersebut dilaksanakan oleh sejumlah lembaga, lajnah, dan badan otonom, yang dalam organisasi NU termasuk dalam perangkat organisasi Tanfidziyah.[105]

---

[103] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 12 Mei 2001. Data-data selanjutnya sebagian besar penulis peroleh dari hasil wawancara. Hal ini disebabkan, karena peristiwa-peritiwa sejarah di NU DIY sebagian besar tidak terdokumentasi.

[104] Wawancara dengan H. Sofwan Helmy (Ketua PWNU DIY), tanggal 9 Mei 2001

[105] Keterangan lebih lanjut tentang ketiga perangkat organisasi tersebut, lihat *Hasil-hasil Muktamar XXX NU,* (Jakarta: Sekjen PBNU, 2001), pp. 127-32

Untuk menangani masalah pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal dan non formal, NU membentuk Lembaga Pendidikan Ma'arif, dengan maksud untuk mengoptimalkan program pendidikannya. Dengan demikian, Lembaga Pendidikan formal dan non formal, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerjanya kepada NU DIY.[106] Namun sampai sekarang, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY hanya memiliki lembaga-lembaga pendidikan formal.

Walaupun NU DIY dibentuk tahun 1931, namun Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY baru terbentuk pada tahun 1940-an. Hal ini disebabkan, karena sebelum tahun tersebut, NU DIY belum memiliki lembaga-lembaga pendidikan formal. Pembentukkan tersebut dimotori oleh K.H. Abdullah Afandi (sekaligus menjadi ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY pertama) dan K. H. Abdul Kadir.[107]

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembentukkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan program NU DIY dalam bidang pendidikan, yang pada awal berdirinya hanya mengembangkan madrasah-madrasah. Pendirian madrasah-madrasah ini mulai banyak muncul pada tahun 1967.[108] Sikap tersebut diambil sebagai respon NU, khususnya NU DIY terhadap perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI),[109] yang pada bulan Mei 1965 sudah memiliki 3 juta anggota partai dan 20 juta anggota organisasi-organisasinya di Indonesia.[110]

Beranjak dari kenytaan di atas, upaya-upaya NU dalam mendirikan madrasah-madrasah dilakukan membekali umat Islam dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT agar mereka memiliki

---

[106] Wawancara dengan H. Sofwan Helmy (Ketua PWNU DIY), tanggal 9 Mei 2001

[107] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 12 Mei 2001. Sebagaimana *foot note* nomor 1, data-data sejarah di NU tidak terdokumentasi dengan baik, oleh karena itu mengenai tahun pembentukan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY tidak diketahui secara pasti.

[108] Tentang jumlah madrasah yang muncul pada tahun tersebut tidak diketahui secara pasti. Wawancara dengan H Afandi (Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 22 April 2001

[109] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan MA'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

[110] Andree Feillard, *NU Via-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna,* Terj. Lesmana, (Yogyakarta: LKiS, 1999), p. 71

keteguhan hati dalam menghadapi pengaruh-pengaruh paham komunis yang berkembang pesat pada waktu itu.

Di samping itu, warga NU lainnya mendirikan sekolah-sekolah NU di bawah Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI).[111] Melihat fenomena tersebut, muncul pemikiran untuk menyatukan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah NU tersebut ke dalam sebuah yayasan. Maka, pada tahun 1976, bertempat di gedung SMP/SMA Pembangunan Yogyakarta (sekarang SMP/SMU Ma'arif Yogyakarta), jalan Pajeksan GT I/509 Yogyakarta, dibentuklah Yayasan Ma'arif NU DIY yang dipelopori, antara lain oleh H. Ahmad Arwan Bauis, Suwardiyono, dan Nurhadi (pengasuh Pondok Pesantren Nurul Umam).[112]

Selain alasan di ats, pembentukkan yayasan tersebut merupakan suatu realitasi dari peraturan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), yang mengeluarkan peraturan bahwa sekolah swasta harus diselenggarakan oleh suatu penyelenggara sekolah/yayasan yang bersifat sosial dan tidak mencari keuntungan.[113] Oleh Karen aitu, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY membentuk yayasan tersebut untuk menjadi "payung" dari madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah NU DIY. Yayasan ini merupakan pelaksanan teknis dari program-program Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY.

Peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia.[114] Meskipun lembaga pendidikan swasta itu dilaksanakan oleh masyarakat, yang juga merupakan salah satu pemegang tanggung jawab pendidikan di Indonesia, namun pemerintah tetap memper-

---

[111] Yayasan ini dibentuk oleh Pengurus Cabang NU Gunung Kidul. Lihat *Bangkit,* No. 1 November – Desember 1992, p. 59

[112] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan MA'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

[113] Lihat Keputusan Direktur Jenderal Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I/ 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta Bab II, pasal 5

[114] Wawancara dengan Bambang Sutikno (Kepala Sub Bagian Penerangan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi DIY), tanggal 14 Mei 2001

hatikan dan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan tersebut.

Dengan dibentuknya yayasan tersebut, berarti yayasan-yayasan yang sebelumnya berada di masing-masing madrasah dan sekolah NU melebur ke dalam Yayasan Ma'arif NU DIY. Oleh karena itu, semenjak tahun 1976, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIy mulai memunculkan sekolah-sekolah NU, seperti SMP dan SMA (sekarang SMU). Upaya ini dilakukan dalam rangka membina dan membekali warga NU DIY dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat berguna dalam kehidupan berbangsan dan bernegara. Sekolah NU yang baru dikemangkan saat itu adalah SMP Sunan Kalijaga Cangkringan.[115]

Pendirian sekolah-sekolah NU di DIY pada tahun itu merupakan moment awal bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY untuk lebih mengotimalkan dan mengintensifkan pengembangan pendidikannya.

B. Konsep Pendidikan Menurut Lembaga Pendidikan Ma'arif

Masyarakat sebagai salah satu pemegang tanggung jawab dan penyelenggara pendidikan di Indonesia – selain pemerintah dan keluarga – turut memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi pendidikan masyarakat tersebut bisa berwujud organisasi sosial keagamaan, atau perkumpulan sosial lainnya.

Berkenan dengan peranserta masyarakat dalam pendidikan tersebut, pemerintah, melalui UUSPN No. 2 tahun 1989, menetapkan bahwa masyarakat memiliki peranserta yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan tatap memperhatikan cirri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut.[116]

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat memilki kesempatan yang luas untuk menyelenggarakan dan mengembangkan satuan pendidikannya menurut cirri khasnya masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah menyadari adanya keragaman agama dan budaya

---

[115] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

[116] Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XIII, pasal 47, beserta penjelasannya.

di masyarakat, termasuk masyarakat penyelenggara pendidikan. Untuk itu pemerintah tetap menghargai setiap masyarakat penyelenggara pendidikan tersebut yang tetap memiliki cirri khasnya masing-masing.

Walaupun demikian, kebebasa untuk menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut masih bisa ditolelir sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup dan ideology bangsa dan Negara.[117]

Beranjak dari peranserta masyarakat tersebut, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY berpandangan bahwa pendidikan itu berakar dan tumbuh dari masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan pengembangan pendidikan itu pun harus berdasarkan pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat memiliki kebebasan bertindak dalam upaya pengembangan pendidikannya.[118]

Statement tersebut member gambaran akan pentingnya sistem desentralisasi pendidikan. Jauh sebelum Undang-undang Otonomi Daerah di tetapkan sejak 1 Januari 2001 kemaren, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY sudah merasakan perlunya sistem desentralisasi pendidikan. Ironis memang, jika harus memakai sistem sentralisasi pendidikan di Negara Indonesia yang memiliki agama dan budaya yang beragam ini.

Walaupun demikian, secara formal rumusan tujuan pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY tetap mengikuti rumusan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Lembaga Ma'arif Pusat Jakarta.[119] Tujuan tersebut adalah

"a. membina manusia muslim yang taqwa kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala, berbudi luhur, cerdas, berpengatahuan luas, cakap, trampil dan bertanggung jawab, berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa;

b. agar pengaruh pendidikan Islam luas merata dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara;

---

[117] Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah,* (Yogyakarta: Sipress, 1993), p. 230

[118] Wawancara dengan H. Afandi (Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 6 Mei 2001

[119] Wawancara dengan H. M. Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

c. agar ajaran Islam menjadi mata pelajaran disemua sekolah negeri;
d. mempersiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk menjadi angkatan pembangunan yang taqwa, cakap, dan kuat;
e. agar setiap warga Negara mendapat kesempatan untuk belajar di segala jurusan;
f. memajukan dan mengembangkan segala cabang ilmu pengetahuan, yang diperlukan bagi kemajuan Nusa dan Bangsa;
g. memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik, terutama kebudayaan Indonesia yang tidak bertentangan dengan Islam;
h. membendung serta menolak kebudayaan yang membahayakan akhlak dan kepribadian Indonesia."[120]

Beranjak dari tujuan pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif di atas, H. M. Jalaludin mengatakan, bahwa pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY lebih menekankan prinsip ibadah dan budi pekerti.[121] Hal ini bisa dimengerti, melihat realitas kehidupan remaja Indonesia sekarang, terutama di kota-kota besar, semakin banyak terjadi kenakalan remaja, perkelahian pelajar, prostitusi remaja, penyalahgunaan obat-obatan oleh orang tua, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal lain yang ditekankan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY adalah prinsip kesederahanaan, dalam Bahasa Jawa diistilahkan dengan *kalah ing rupo*, *menang ing dungo* (kalah dari segi fisik, menang dari segi do'a). dengan prinsip tersebut dan dengan status Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY yang merupakan suatu gerakan sosial (yayasan) yang tidak mencari keuntungan, maka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY tidak memberatkan warganya dengan biaya SPP (sumbangan penyelenggara pendidikan) yang mahal.[122]

Walaupun demikian, perlu dipertanyakan apakah biaya SPP yang relatif murah tersebut memang merupakan implikasi dari prinsip

[120] Perubahan Peraturan Dasar Nomor 103 Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jakarta.

[121] Wawancara dengan H. M. Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

[122] Wawancara dengan H. M. Jalauddin(Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

kesederhanaan itu, atau hanya sebagai alat untuk menarik minat siswa untuk masuk ke Lembaga-Lembaga Pendidikan Ma'arif pada umumnya belum dapat bersaing sepenunya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Namun nanti, jika lembaga-lembaga Pendidikan Ma'arif sudah bisa dikatakan bonafit dan membutuhkan persaingan ketat untuk memasukinya, apakah masih mempertahankan SPP yang relatif murah ini ? Untuk menjawab persoalan sederhana ini, perlu melihat perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Ma'arif beberapa tahun ke depan.

Selain hal di atas, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY juga menyadari, bahwa pendidikan merupakan sarana yang urgen bagi organisasi NU dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai yang mereka anut yakni *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*.[123]

Oleh karena itu, pendidikan juga dipandang sebagai salah satu sarana bagi NU untuk mentransfer nilai-nilai (*transfer of values*), baik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi maupun berupa ajaran, doktrin, atau paham yang mereka anut. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, karena bagaimanapun juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, dan bahkan lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah pun, mempunyai misinya masing-masing dan senantiasa berupaya mentransformasikan misi tersebut kepada warganya, yang salah satunya melalui jalur pendidikan.

C. Lembaga-Lembaga Pendidikan di bawah Pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif

Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, secara tidak langsung menghendaki adanya perbaikan-perbaikan di segala bidang. Termasuk di bidang pendidikan. Berikut akan dijabarkan terlebih dahulu dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dalam upaya pengembangan pendidikannya mulai tahun 1972 sampai 2000, sebagai upaya dalam menyertai perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan sebagai mitra pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangung manusia Indonesia seutuhnya.

---

[123] Wawancara dengan H. Afandi (Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 6 Mei 2001

1. Tahap Pencapaian Jati Diri

Tahap pencapaian jati diri ini belangsung antara tahun 1972 sampai 1982. Semenjak Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dibentuk pada tahun 1940-an, masing-masing warga NU berupaya mendirikan madrasah-madrasah. Upaya tersebut dilakukan untuk membekali warga NU khususnya dan warga Negara Indonesia pada umumnya dengan ilmu-ilmu agama agar tertanam keimanan yang teguh dan terhindar dari pengaruh-pengaruh doktrin komunis yang sudah berkembang pada waktu itu. Kemunculan madrasah tersebut berkembang pesat pada tahun 1967.

Walaupun madrasah di lingkungan NU sudah berdiri dan Lembaga Pendidikan Ma'arif pun sudah dibentuk pada tahun 1940-an, tetapi keberadaannya belum – untuk tidak mengatakan tidak – terorganisir dengan baik, sehingga madrasah tersebut berkembang apa adanya sesuai dengan kemampuan pendiri dan pengelolanya masing-masing.

Sementara sebagian warga NU lainnya menyadari, bahwa pendidikan agama tidak hanya dapat dikembangkan dengan mendirikan madrasah, tapi juga dapat dikembangkan melalui sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu mulai tahun 1975, warga NU mendirikan sekolah-sekolah umum di bawah Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI).

Melihat adanya fenomena warga NU yang masing-masing mendirikan madrasah dan sekolah tersebut, mendorong adanya pemikiran untuk menyatukan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah tersebut ke dalam sebuah yayasan. Akhirnya, dibentuklah yayasan dimaksud pada tahun 1976 dengan nama Yayasan Ma'arif NU DIY.

Pembentukkan yayasan tersebut merupakan langkah awal bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY untuk lebih mengintensifkan dan mengoptimalkan perhatiannya dalam pengembangan pendidikan, karena sebelumnya madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah tersebut tidak terorganisir dengan baik.

Walaupun maksud awal pembentukkan yayasan ini untuk menyatukan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang berjalan sendiri-sendiri, namun upaya perekturan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang lancer tanpa hambatan. Banyak sekolah-sekolah saat itu menyembunyikan keterkaitannya dari NU, karena takut akan

mendapatkan perlakuan deskriminatif dari pemerintah. Alasan ini bisa dipahami, karena pada tahun 1970-an telah terjadi hubungan yang kurang harmonis antara ulama dengan pemerintah. Pada waktu itu, NU dianggap sebagai oposan yang ditakuti pemerintah.[124]

Di tahun yang sama, terjadi penegerian madrasah oleh pemerintah. Penegerian tersebut dilakukan untuk menampung sekitar 60.000 orang guru agama yang diangkat sebagai pegawai negeri.[125]

Di DIY misalnya, seluruh Madrasah Aliyah Negeri yang ada sekarang berasal dari Madrasah-madrasah Ma'arif, kecuali MAN 2 Notoyudan, MAN BAntul, dan MAN Pakem.[126] Belum lagi jika dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang tidak terdata jumlahnya.

Tanpa bermaksud menafikan dampak positifnya, penegerian madrasah tersebut memberikan ekses yang merugikan bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Dengan adanya penegerian madrasah tersebut, berarti secara otomatis Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dengan madrasah-madrasah tersebut tidak ada hubungan lagi. Kalaupun ada dampak positifnya, yakni untuk menampung warga NU untuk menjadi pegawai negeri,[127] itupun berlangsung dalam waktu yang singkat, karena *in put* madrasah tersebut tidak semata-mata warga NU lagi.

Walaupun demikian, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY menerimanya dengan besar hati, menyambut niat baik pemerintah tersebut dengan menyumbangkan Madrasah-madrasah Ma'arif kepada pemerintah untuk dinegerikan.

Sementara imbalan dari pemerintah, mulai tahun 1981 sampai 1987 Madrasah dan Sekolah Ma'arif mendapat bantuan guru dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dari Departemen Agama, yang sebelumnya tidak mendapat bantuan guru dari peme-

---

[124] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001. Bandingkan dengan Andree Feillard, *NU ....,* pp. 302-04

[125] *Ibid.,* p. 260

[126] Wawancara dengan H. M. Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 29 April 2001

[127] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

rintah.[128] Konsekuensinya, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY menerima apa dan bagaimana pun latar belakang kehidupan guru bantuan tersebut, tidak memperhatikan lagi apakah mereka termasuk warga NU atau bukan, atau apakah mereka orang Islam atau non Islam.

Kenyataan ini dapat dilihat dengan adanya guru beragama Kristen yang mengajar di SLTP Wonosari (sekarang sudah tidak ada lagi).[129] Selain itu, bantuan pemerintah tersebut membawa kepada intervensi pemerintah dalam pengangkatan Kepala Madrasah/Sekolah. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY kehilangan hak untuk menentukan Kepala Madrasah/Sekolah. Pada waktu itu, posisi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY biasanya hanya sekedar merekomendasikan.[130]

Pada tahap ini, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY berusaha mendirikan MI, MTs, MA, SLTP, SMU, dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta (STITY) yang berhaluan *ahlu sunnah wa al-jama'ah*.

Berbagai liku-liku problematika dialami Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY di awal-awal pertumbuhannya. Pada tahap ini Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY berusaha mencari jati dirinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan berdasarkan pada paham mereka anut di antara lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

2. Tahap Kemapanan

Tahap ini berlangsung antara tahun 1982 sampai 1992. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa mulai tahun 1981 sampai 1987 Madrasah-madrasah dan Sekolah-sekolah Ma'arif menerima bantuan guru dari pemintah. Adanya bantuan ini sedikit banyak mempengaruhi pola pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY terhadap madrasah dan sekolahnya. Guru bantuan dari Departemen Agama yang diistilahkan dengan *guru diperbantukan/*dpb, masih tetap dalam

---

[128] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

[129] Wawancara dengan H. M. Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

[130] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

pengelolaan dan pengawasan Departemen Agama. Guru bantuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diistilahkan dengan *guru dipekerjakan/*dpk, diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. (Lebih lanjut tentang manajemen pendidikannya akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya).

Terlepas dari akses yang dihasilkan dari intervensi pemerintah tersebut, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengembangkan pendidikannya, khususnya mengembangkan Sekolah-sekolah Ma'arif. Pada tahap ini, madrasah/sekolah yang ada boleh dibilang sudah bangkit dan mapan.

Madrasah/sekolah Ma'arif Yogyakarta berjalan wajar sebagaimana madrasah/sekolah pada umumnya, karena pada dasarnya sistem pendidikan yang dikembangkan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY juga mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, Madrasah-sekolah Ma'arif juga memakai kurikulum dan materi yang digunakan oleh madrasah/sekolah negeri pada umumnya. Hanya saja ada tambahan mata pelajaran ke-NU-an, itu pun hanya untuk madrasah/ sekolahnya saja.

Dalam kontek ini, Sekolah Tinggi Imu Tarbiyah Yogyakarta (STITY) di Wonosari – satu-satunya perguruan tinggi milik Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY – justru belum ada maya kuliah ke-NU-an tersebut, sehingga tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan antara perguruan tinggi milik Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dengan Perguruan Tinggi Islam lainnya. Namun untuk tahun akademik mendatang, mata kuliah ke-NU-an direncanakan menjadi bagian dari kurikulum di STITY.[131]

Pada tahap kemapanan ini, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mendirikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Prambanan dan Sekolah menengan Kejuruan (SMK) di beberapa tempat seperti di Bantul, Wates, Temon, Sleman, Nanggulan, dan Wonosari. Kemapanan tersebut membawa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY untuk berusaha mencari paradigm baru untuk lembaga-lembaga pendidikannya.

Dalam pencarian paradigm baru memang memerlukan sebuah keberanian bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY jika ingin menjadikan lembaga-lembaga pendidikannya memiliki kualitas yang

---

[131] Wawancara dengan Edi Jainuri (Pembantu Ketua III STITY), tanggal 12 Mei 2001

handal dan cirri khas tersendiri dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dengan tidak semata-mata mengadopsi sepenuhnya Sistem Pendidikan NAsional. Walaupun untuk menuju kea rah yang diinginkan tersebut tidak hanya bermodalkan keberanian saja, tetapi keberanian tersebut juga perlu dukungan modal dasar lainnya seperti ketersediaan dana yang banyak dan kompetensi sumber daya manusia yang handal.

3. Tahap Pencarian Paradigma Baru

Tahap ini berlangsung antara tahun 1992 sampai 2000. Pada tahap ini, usaha-usaha untuk mengembangkan pendidikan terus dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Pada tahun 1996. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY telah menghadirkan buku ke-NU-an yang telah disesuaikan dengan GBPP untuk tingkat SLTP, walaupun sudah banyak madrasah/sekolah yang terlanjur membeli buku ke-NU-an dari daerah lain, baik dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah maupun dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur. Walaupun demikian, kehaadiran buku ke-NU-an dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY tersebut cukup membantu mempermudah madrasah/sekolah dalam menyebarluaskan ajaran ahlu al—sunnah wa al-jama'ah secara efektif dan efesien.

Berkaitan dengan penerbitan buku tersebut, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mengadakan penataran ke-NU-an bagi guru-guru madrasah/sekolah dengan biaya mandiri yang bertujuan untuk mencapai satu pandangan berkenaan dengan ke-NU-an, dan untuk menyatukan langkah dan visi dalam memberikan pelajaran pada anak didik. Adapun untuk tingkat SMU masih menungu hadirnya buku ke-NU-an yang baru, jika buku ke-NU-an untuk tingkat SLTP sudah habis, sehingga biaya yang sudah ada dapat digunakan untuk meneruska penerbitan buku ke-NU-an untuk tingkat SMU.[132]

Berkenaan dengan pengembangan institute, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY tetap mengusahakan didirikannya lembaga pendidikan formal yang baru, seperti didirikannya SMK Ma'arif di Wates pada tahun ajaran 1994/1995. Kemudian pada tahun ajaran 1996/1997 telah ber-

---

[132] Laporan Kegiatan Yayasan Ma'arif NU DIY Periode 1992/1997

hasil mendirikan tiga sekolah, yaitu SMK Ma'arif 2 Bantul (SMK Kartini) di Draman Srimartani Piyungan Bantul, SMK Ma'arif 3 Bantul (STM Ma'arif) di Kretek Bantul, dan SMK Ma'arif 2 Gunung Kidul (SMEA Ma'arif) di Wonosari. Pada tahun ajaran 1997/1998 juga telah didirikan sekolah baru, yaitu SMK Ma'arif 2 Temon (STM Ma'arif) di Temon dan SMK Ma'arif Nanggulan.

Selain itu, pada tahun ajaran 1997/1998 Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY juga meningkatkan peningkatan akreditasi sekolah yang semula statusnya *diakui* menjadi *disamakan*, yaitu SMK YAPPI di Wonosari dan SMK Ma'arif 2 Sleman di Tempel. Sedangkan status *terdaftar* menjadi *diakui* terdapat pada SMU Pembangunan 2 Bantul di Dlingo.[133]

Pengembangan lembaga-lembaga pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY kelihatannya lebih *concern* pada pengembangan sekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan minat masyarakat terhadap madrasah tergolong relative rendah.[134] Kenyataan tersebut bisa terjadi, karena orang tua memasukkan anaknya ke suatu lembaga pendidikan tidak semata-mata untuk mencari ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu, pertimbangan lainnya adalah agar dapat mencari pekerjaan dengan mudah.

Fenomena tersebut tidak bisa dipungkiri, kecuali jika madrasah-madrasah menawarkan program-program pendidikan yang dapat membentuk anak didiknya mampu bersikap mandiri atau dapat mencari pekerjaan dengan mudah. Dengan kata lain – sebagaimana yang dikatakan oleh H. Afandi – jika madrasah bisa menawarkan atau menjanjikan kerja yang lebih baik, mungkin masyarakat akan banyak memasukkan anak mereka ke madrasah.[135] Hal ini baru menjadi bahan pemikiran bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dalam mencari paradigm baru pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY.

Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas madrasah/sekolah yang ada, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIy memberikan predikat

---

[133] Laporan Kegiatan Yayasan Ma'arif NU DIY Tahun 1999

[134] Wawancara dengan H.M.Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tangga 21 Februari 2001

[135] Wawancara dengan H. Afandi (Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 22 April 2001

kepada madrasah-madrasah/sekolah-sekolah yang berstatus *disamakan* sebagai madrasah/sekolah unggulan di daerah kabupatennya masing-masing. *Policy* ini diambil untuk memicu madrasah/sekolah yang lain untuk senantiasa meningkatkan kualitas satuan pendidikannya.[136]

Pencarian paradigm baru ini dilakukan karena Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dihadapkan pada dihentikannya bantuan guru dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1987 lalu. Adapun bantuan guru dari Departemen Agama masih berlangsung sampai sekarang.

Keadaan tersebut menimbulkan keprihatinan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY, karena guru-guru bantuan tersebut sudah mulai beranjak pension. Hal ini mengharuskan pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY memikirkan dan mencari jalan keluarnya.

H.M. Jalaluddin mengatakan, jika hal itu terjadi, maka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY mengambil *policy* dengan jalan menerima sukarelawan atau guru yayasan untuk menggantikan guru-guru yang akan pension tersebut.[137] Pernyataan tersebut baru merupakan pemikiran awal menuju pencarian paradigm-paradigma yang lain.

Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY adalah :

a) Madrasah

Madrasah yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun. Madrasah Tsanawiyah adalah lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang menyelenggarakan program pendidikan 3 tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) yang

[136] Wawancara dengan H.M.Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

[137] Wawancara dengan H.M.Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei

menyelenggarakan program pendidikan 3 tahun setelah Madrasah Tsanawiyah atau SLTP.[138]

Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dikategorikan sebagai program Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam. Madrasah Aliyah dikategorikan sebagai Sekolah Menengah Umum Berciri Khas Agama Islam. Ciri khas agama Islam terbentuk: 1) mata pelajaran-mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari Pendidikan Agama Islam kepada ilma sub pelajaran agama Islam, yakni Qur'an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. 2) Suasan keagamaan, seperti suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode dan pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan, serta kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia.[139]

1) Kurikulum

Komposisi kurikulum pada tingkat ibtidaiyah terdiri dari 13 mata pelajaran. Mata pelajaran pendidikan agama Islam mencakup sekitar 30% dengan lima bidang, yakni Qur'an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sejarah Kebudayaan Islam diberikan mulai kelas tiga. Bahasa Arab diberikan mulai kelas empat. Kecuali mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diberikan mulai kelas tiga, mata pelajaran umum lainnya diberikan mulai kelas satu sampai kelas enam. Pada tingkat tsanawiyah, komposisi kurikulum sama dengan kurikulum tingkat ibtidaiyah, hanya ditambah mata pelajaran Bahasa Inggris.

Pada tingkat Aliyah, komposisi kuriukulum terbagi pada dua program, yakni program umum dan program khusus. Pendidikan Agama Islam yang termasuk dalam program umum,

[138] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Bab I, pasal 1

[139] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 732 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam. Bab III

hanya memuat empat mata pelajaran, yakni Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Aqidah Akhlak hanya diberikan di kelas satu, Sejarah Kebudayaan Islam hanya diberikan pada kelas tiga. Mata pelajaran Bahasa Arab – yang merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam di tingkat Ibtidaiyah dan tsanawiyah – di tingkat aliyah, dilaksanakan dalam kegiatan ekstra kurekuler yang disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah.

Program khusus dijalani pada kelas tiga. Program khusus terdiri dari Program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuan Alam, dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial. (Lihat lampiran).

Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah tersebut berlaku secara nasional. Oleh karena itu, kurikulum Madrasah-madrasah Ma'arif pun harus mengacu pada kurikulum madrasah di atas.

Dalam kontek ini, *policy* yang diambil oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY adalah berusaha menambah kurikulum nasional tersebut dengan mata pelajaran ke-NU-an, dengan tidak mengurangi jumlah mata pelajaran yang berlaku secara nasional.[140] Sikap tersebut member sinyal, bahwa Madrasah-madrasah Ma'arif memang bersedia menerima pelajaran umum, namun menolak mengurangi pelajaran agama.

2) Buku Pelajaran

Buku pelajaran yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar adalah buku-buku paket dari Departemen Agama untuk mata pelajaran yang termasuk dalam pendidikan agama Islam, dan buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional untuk mata pelajaran umum. Khususnya untuk mata pelajaran ke-Nu-an, buku yang dipergunakan adalah buku ke-NU-an terbitan Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr NU DIY,[141] di samping itu juga

---

[140] Wawancara dengan H. Ahmad Arwan Bauis (Ketua Yayasan Ma'arif NU DIY), tanggal 7 Mei 2001

[141] Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr adalah salah satu perangkat organisasi NU yang bertugas di bidang penerjamahan, penyusunan dan penyebaran kitab-kitab menurut paham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah. Lihat *Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama,* (Jakarta: Sekjen PBNU, 2001), p. 130

digunakan buku ke-NU-an dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai bahan dibandingan dan pengembangan wawasan.

3) Guru

Guru-guru yang ada di Madrasah-madrasah Ma'arif terdiri dari guru-guru bantuan dari Departemen Agama (Depag), Guru Tetap Yayasan (GTY), dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY). Guru bantuan Depag berjumlah tidak kurang dari 355 orang.[142] Mereka langsung menerima gaji dan Depag sesuai dengan kepangkatan dan golongan masing-masing.

Mengenai GTY, data jumlah terakhir diketahui sebanyak 1778 orang. Jumlah ini termasuk untuk jumlah GTY di sekolah-sekolah Ma'arif.[143] Sedangkan jumlah GTTY tidak diketahui secara pasti, namun yang jelas jumlahnya melebihi jumlah GTY. Gaji mereka di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang ditetapkan tiap tahun oleh masing-masing madrasah. Besar kecilnya APBS tergantung dari anggaran pemasukan ke madrasah tersebut. Jadi guru di madrasah/sekolah yang satu memiliki gaji yang berbeda dengan guru di madrasah/sekolah yang lain.

4) Inspeksi (Pengawasan)

Satuan pendidikan Madrasah Ma'arif berada di bawah pengawasan Depag. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap madrasah-madrasah yang bersangkutan.[144] Pengawasan serupa juga dilakukan oleh pengurus

---

[142] Jumlah guru tersebut adalah jumlah minimal dari keseluruhan guru bantuan Depag. Jumlah ini tidak diketahui secara pasti karena ada beberapa madrasah yang belum melaporkan jumlah gurunya kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Lihat Data Madrasah/Sekolah di Lingkungan Ma'arif Tahun Ajaran 1985/1986

[143] Wawancara dengan H.M.Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

[144] Lihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah. Bab XII, pasal 20; Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah. Bab XII, pasal 23; Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Bab XII, pasal 23

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY berkenaan dengan masalah teknis dan administrasi pendidikan.[145]

b) Sekolah

Sekolah-sekolah yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY adalah SLTP, SMU, SMK, dan SDLB.

SLTP merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 tahun setelah SD atau Madrasah Ibtidaiyah. SMU adalah satuan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk melanjutkan dan memperluas pendidikan dasar serta mempersiapkan anak didik untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. SDLB adalah satuan pendidikan setingkat SD yang khusus diselenggarakan bagi anak didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.[146]

1) Kurikulum

Kurikulum di satuan pendidikan SLTP dan SMU sama dengan kurikulum yang ada dalam Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hanya saja, di SLTP dan SMU tidak terdapat kurikulum yang menggambarkan ciri khas agama Islam sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian kurikulum dna buku pelajaran yang dipakai pun sama.

Mengenai kurikulum SMK, pemerintah pun sudah mengatur kurikulumnya SMK Ma'arif juga mengacu pada peraturan tersebut. Kurikulum SMK diorganisasikan ke dalam komponen yang bersifat: normative, adaptif, dan produktif. Komponen normative wajib memuat mata pelajaran.

---

[145] Laporan Kegiatan Yayasan Ma'arif NU DIY Periode 1992/1997

[146] Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 054/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama. Bab I, Pasal 1; Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Bab I, Pasal 1; Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan. Bab I, Pasal 1; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Bab I, Pasal 1

1. Pendidikan Pancasila;
2. Pendidikan Agama;
3. Pendidikan Kewarganegaraan;
4. Bahsa Indonesia;
5. Sejarah Indonesia dan Sejarah Umum;
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Komponen adaptif memuat mata pelajaran yang memberikan konsep berpikir analitis, logis, dan kreatif yang mendukung kemampuang tamatan dalam mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Komponen produktif memuat mata pelajaran yang membekali keteranpilan dna sikap kerja profesional sesuai dengan kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja.

SMK-SMK Ma’arif hanya menambah mata pelajaran ke-Nu-an untuk menunjukkan ciri khas tersendiri dari SMK-SMK yang lain.

Adapun SDLB yang dimiliki Lembaga Pendidikan Ma’arif NU DIY adalah SDLB tipe B (untu tuna rungu) dan tipe C (untu tuna grahita).[147] Karena SDLB ini setingkat SD, kurikulum yang digunakan pun sesuai dengan kurikulum SD dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar anak didik yang bersangkutan. Penyampaian mata pelajaran pun disesuaikan denga jenis kelainan anak didik.[148]

2) Buku Pelajaran

Buku pelajaran yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar adalah buku-buku paket dari Departemen Agama untuk mata pelajaran yang termasuk dalam pendidikan Agama Islam, dan buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional untuk mata pelajaran umum. Khusus untuk mata pelajaran ke-

---

[147] Wawancara dengan Harsono (Kepala SDLB Bhakti Pertiwi Prambanan), tanggal 8 Mei 2001

[148] Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.

NU-an, buku yang dipergunakan adalah buku ke-NU-an terbitan Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr NU DIY,[149] di samping itu juga digunakan buku ke-NU-an dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai bahan bandingan dan pengembangan wawasan.

3) Guru

Guru-guru yang ada di Sekolah-sekolah Ma'arif terdiri dari guru bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), GTY, dan GTTY. Jumlah guru bantuan Depdiknas tidka kurang dari 75 orang,[150] mereka langsung mendapatkan gaji dari Depdiknas sesuai dengan kepangkatan dan golongan masing-masing.

Adapun jumlah GTY dan GTTY di sekolah umum, sudah digabung dengan jumlah GTY dan GTTY di Madrasah sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Gaji mereka disesuaikan dengan APBS yang bersangkutan. Jadi setiap sekolah berbeda dalam mengeluarkan gaji untuk GTY dan GTTY tersebut.

4) Inspeksi (Pengawasan)

Satuan pendidikan sekolah berada di bawah pengawasan Depdiknas. Sebagaimana pengawasan yang dilakukan Depag terhadap madrasah, pengawasan Depdiknas ini pun dilakukan dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dna pelayanan terhadap sekolah-sekolah yang bersangkutan. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY sebagai pengelola satuan pendidikan tersebut, juga turut mengawasinya.

---

[149] Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr adalah salah satu perangkat organisasi NU yang bertugas di bidang penerjamahan, penyusunan dan penyebaran kitab-kitab menurut paham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah. Lihat *Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama,* (Jakarta: Sekjen PBNU, 2001), p. 130

[150] Jumlah guru bantuan tersebut merupakan jumlah minimal dari keseluruhan guru bantuan Depdiknas. Jumlah ini belum diketahui secara pasti karena ada beberapa sekolah yang belum melaporkan jumlah gurunya kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Lihat Data Madrasah/Sekolah di Lingkungan Ma'arif Tahun Ajaran 1985/1986

c) Perguruan Tinggi

Satu-satunya perguruan tinggi yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta (STITY) di Wonosari. STITY ini asal mulanya dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) yang berdiri tahun 1971. Pada tahun 1972 UNNU berubah menjadi Universitas Islam Yogyakarta (UIY). Perubahan nama tersebut berhubungan dengan situasi politik pada waktu itu yang tidak membenarkan suatu partai menyelenggarakan satuan pendidikan. Pada tahun 1989 berubah lagi menjadi STITY.[151]

Perubahan nama dari universitas menjadi sekolah tinggi bukan berarti penurunan kualitas perguruan tinggi tersebut. Penanaman universitas pada waktu itu karena memang belum ada aturan pemerintah yang mengatur tentang nama suatu perguruan tinggi,[152] dimana sekarang, nama suatu perguruan tinggi mencerminkan adanya perbedaan dengan perguruan tinggi yang lain dalam hal sedikit banyak atau bervariasi tidaknya satuan pendidikan yang diselenggarakan. Dengan kata lain, universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi memiliki perbedaan masing-masing.[153]

Sistem perkuliahan memakai sistem kredit semester (SKS). Mata kuliah dibagi kepada Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK), ditambah dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan skripsi.

Melihat sistem perkuliahan dan kurikulum STITY (sebagaimana terlampir), tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan atau ciri khas tersendiri dari perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah ke-NU-an pun tidak ada, padahal perguruan tinggi tersebut merupakan satu-satunya perguruan tinggi milik

---

[151] *Panduan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta 1996/1997,* p. 1

[152] Peraturan dimaksud adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 1988 tentang Perguruan Tinggi Swasta. Di dalamnya disebutkan bahwa bagi Perguruan Tinggi Agama Islam yang hanya memiliki satu jurusan harus memakai nama sekolah tinggi, bukan universitas.

[153] Lebih jelasnya lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab V, Pasal 16

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY yang seharusnya perlu juga menampilkan ciri khas tersendiri dari perguruan tingginya.

D. Pola Manajemen Pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif

Untuk operasionalisasi program-program pendidikan, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY membentuk Yayasan Ma'arif NU DIY. Yayasan inilah yang menangani secara teknis pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Dengan kata lain, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY bisa dikatakan sebagai badan legislative, sedangkan Yayasan Ma'arif NU DIY bisa dikatakan sebagai badan eksekutif dalam menangani program-program pendidikan organisasi NU.

Dalam pengelolaan madrasah/sekolah yang ada di bawahnya, Yayasan Ma'arif NU DIY memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada madrasah/sekolah untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan pendidikannya. Walaupun isi kurikulumnya tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun Madrasah/sekolah Ma'arif diberi kebebasan untuk mengembangkan satuan pendidikannya yang diharapkan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*demand orientesd*).

H. Afandi mengatakan bahwa Lembaga-lembaga Pendidikan Ma'arif berasal dari dan untuk masyarakat.[154] Oleh karenan berasal dari masyarakat, maka kemampuan untuk mengembangkan pendidikannya pun tergantung pada masyarakat itu sendiri.

Beranjak dari pola manajemen tersebut, Yayasan Ma'arif NU DIY berfungsi sebagai koordinasi lembaga-lembaga pendidikan yang tumbuh dari masyarakat tersebut, dalam arti membimbing, membina, mendorong, dan mengayomi, serta melindunginya dalam sebuah yayasan yang berbadan hokum.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh yayasan berupa pengkoordinasian bantuan-bantuan dari pemerintah, baik berupa pengkoordinasian bantuan-bantuan dari pemerintah, baik berupa uang, sarana prasarana, maupun bantuan tenaga pengajar/guru.

---

[154] Wawancara dengan H. Afandi (Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 6 Mei 2001

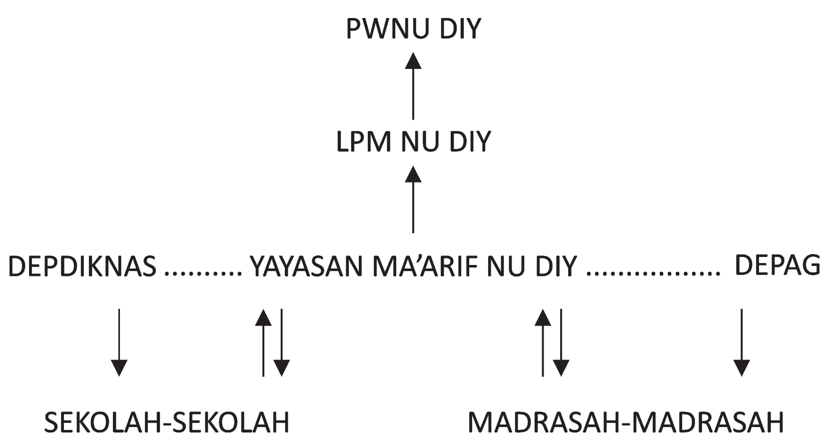
Yayasan Ma'arif NU DIY – sebagai pengelola satuan Pendidikan – tidak bisa melepaskan akuntabilitas pendidikannya. Oleh karena itu yayasan juga melakukan supervise kepada lembaga-lembaga pendidikannya. Hal ini tidak bisa diabaikan, karena yayasan memiliki tanggung jawab moral kepada pemerintah (Depag dan Depdiknas) mengenai pelaksanaan satuan pendidikan di bawah pengelolaannya.

Pemerintah pun turut bertanggung jawab dengan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ma'arif NU DIY. Tanggung jawab terhadap pengelolaan madrasah dilimpahkan kepada Depag sedang tanggung jawab terhadap pengelolaan sekolah dilimpahkan kepada Depdiknas.

Secara sederhana, pola manajemen pendidikan di Yayasan Ma'arif NU DIY dapat dilihat pada skema berikut :

SKEMA

POLA MANAJEMEN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Keterangan :

↑ = garis tanggung jawab (akuntabilitas vertikal)

↓ = garis pengawasan

………. = garis koordinatif

- Kepala madrasah/sekolah bertanggung jawab kepada Yayasan Ma'arif NU DIY
- Secara struktural Yayasan Ma'arif NU DIY bertanggung jawab kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY, secara moral bertanggung jawab kepada Depag dan Depdiknas.
- Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY bertanggung jawab kepada PWNU DIY.
- Yayasan Ma'arif NU DIY dapat berkoordinasikan dengan Depag dan Depdiknas.
- Yayasan Ma'arif NU DIY bersama-sama Depag dan Depdiknas melakukan pengawasan terhadap madrasah dan sekolah.

Bentuk koordinasi yayasan dengan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan guru bantuan pemerintah di Madrasah/sekolah Ma'arif. Depdiknas menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan. Dengan demikian, penggantian tugas dan fungsi atau pemutasian guru yang bersangkutan diserahkan kepada yayasan, dengan tetap memberitahukan kepada Depdiknas. Berbeda dengan guru bantuan dari Depag, tetap memegang haknya untuk mengelola guru tersebut.[155]

Selain memiliki guru bantuan pemerintah, yayasan juga memiliki GTY dan GTTY. Jika ada GTTY yang dinilai memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap pendidikan di NU DIY dan memiliki prestasi yang baik, Kepala Madrasah/Sekolah yang bersangkutan bisa mengusulkan kepada yayasan untuk menjadikannya sebagai GTY. GTY ditetapkan oleh yayasan dala sebuah Surat Keputusan (SK), sedangkan GTTY hanya di-SK-kan oleh Kepala Madrasah/Sekolah yang bersangkutan.

Surat Keputusan untuk GTTY hanya berlaku satu tahun. Tiap tahun SK tersebut bisa diteruskan atau dicabut. Sistem pengelolaan terhadap GTTY tersebut disebut dengan sistem kontrak.[156] Jika GTTY tersebut dianggap masih diperlukan dan memiliki prestasi yang baik, maka

---

[155] Wawancaradengan H.M.Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 29 April 2001

[156] Wawancara dengan H.M.Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

kontraknya dapat diperpanjang, begitu juga sebaliknya, jika dianggap tidak diperlukan lagi, maka kontraknya dicabut.

Policy itu dilakukan sebagai alat evaluasi terhadap GTTY, sehingga diharapkan GTTY selalu meningkatkan kinerjanya, dengan begitu akan membawa implikasi pada kualitas satuan pendidikannya.

Kepala Madrasah/sekolah juga bisa mengusulkan keperluan tenaga kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan kurikulum kepada yayasan.

Adapun tentang pengangkatan Kepala Madrasah/sekolah, ditetapkan oleh yayasan berdasarkan usulan Dewan Pembina Madrasah/Sekolah bersangkutan. Dewan Pembina tersebut terdiri dari : 1) pengurus NU setempat, 2) tokoh masyarakat, atau masyarakat yang peduli dengan pendidikan, 3) Majelis Wakil Cabang (MWC) Lembaga Pendidikan Ma'arif NU setempat.[157]

Usulan tersebut diajukan ke Depag atau Depdiknas untuk diproses lebih lanjut, apakah usulan tersebut disetujui atau ditolak. Jika disetujui, yayasan menetapkan pengangkatan tersebut, jika ditolak yayasan mengusulkan calon lain yang diambil dari guru setempat atau dari satuan pendidikan yang lain.

Sikap ini diambil yayasan agar tidak terulang kembali intervensi pemerintah yang berlebihan terhadap pengangkatan Kepala Madrasah/Sekolah Ma'arif, yang pada tahun 1970-an, banyak Kepala Madrasah/Sekolah yang diangkat langsung oleh pemerintah berasal dari luar NU.

Selanjutnya, untuk menjaga hubungan harmonis antara yayasan dengan lembaga-lembaga pendidikannya, dalam setiap cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif diadakan pertemuan untuk membahas masalah bersama setiap bulan, seperti masalah kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas guru, pembuatan soal ujian, ujian bersama, penrimaan siswa baru, pakaian seragam sekolah dan masalah kependidikan lainnya. Di sana juga dibahas ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Ketentuan-

[157] Wawancara dengan H.M. Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 13 Mei 2001

ketentuan tersebut diputuskan bersama agar masing-masing satuan pendidikan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya.[158]

Dengan demikian, hubungan yayasan dengan lembaga-lembaga pendidikannya bersifat demokratis. Dalam arti, yayasan tidak memaksakan kehendak kepada lembaga-lembaga pendidikannya untuk melaksanakan apa saja yang diinginkan dan lembaga-lembaga pendidikannya tidak merasa terpaksa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

[158] Wawancara dengan H.M. Jalaluddin (Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY), tanggal 22 Mei 2001.

BAB V
KESIMPULAN

Keseluruhan uraian tentang dinamika pengembangan pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama DIY mulai 1972 sampai 2000 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY pada tahun 1940-an dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk membekali umat Islam dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, agar mereka memiliki keteguhan iman dalam menghadapi pengaruh paham-paham komunis yang berkembang pesat pada waktu itu. Bagi NU sendiri, pembentukkan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pendidikannya dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal.
2. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY melalui lembaga-lembaga pendidikannya merupakan salah satu wadah bagi NU untuk mentranformasikan dan melestarikan nilai-nilai yang ada di NU, karena disadari bahwa pendidikan tidak hanya merupakan upaya mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk mentransformasikan ide-ide, doktrin-doktrin, atau nilai-nilai yang melandasi lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif dalam tubuh organisai NU DIY memudahkan pengkoordinasian dalam struktur organisasi,

khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan formal dan non formal. Eksistensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY memberikan kontribusi yang signifikan bagi NU untuk kemajuan dunia pendidikannya. Lembaga-lembaga pendidikan di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DI Yogyakarta sudah banyak yang tumbuh dan berkembang, baik madarasah, sekolah, maupun perguruan tinggi.

3. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY berpandangan bahwa pendidikan berfungsi sebagai salah satu *agent* dan sarana bagi NU untuk mentranfer nilai-niali (*transfer of values)*, baik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi maupun berupa ajaran, doktrin atau paham yang mereka anut, yakni *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.* Pendidikan itu berakar dan tumbuh dari masyarakat (*grass-roots*). Oleh karena itu pengembangan pendidikan pun harus berdasarkan pada nilai-nilai dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri (*community based education*). Hal yang ditekankan dalam pelaksanaan pendidikannya adalah prinsip ibadah dan budi pekerti/akhlak, serta prinsip kesederhanaan. Dengan prinsiip tersebut, dan dengan status Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY yang merupakan suatu organisasi sosial yang bergerak dalam bidang keagamaan atau organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, berusaha membangun budi pekerti/akhlaq manusia dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pengembangan sistem dan institusi pendidikan NU dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY dapat digambarkan dalam tiga tahapan perkembangan, yakni 1) tahap pencarian jati diri, 2) tahap kemapanan, 3) tahap pencarian paradigma baru. Pada tahap pencarian jati diri, yang berlangsung antara tahun 1972 sampai 1982, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY berusaha mendirikan MI, MTs, MA, SLTP, dan SMU, serta mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU), sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta (STITY). Sebelum tahun 1972 Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY belum terorganisir dengan baik sehingga lembaga-lembaga pendidikannya pun tidak terperhatikan dengan baik.

Pada tahap kemapanan, yang berlangsung antara tahun 1982 sampai 1992, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan tersebut sudah mulai bangkit dan mapan. Pada tahap ini, Lembaga Pendidikan Ma'arif mendirikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Prambanan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa tempat, seperti di Bantul, Wates, Temon, Sleman, Nanggulan, dan Wonosari. Kemapanan tersebut membawa Lembaga Pendidikan Ma'arif untuk berusaha melakukan pencarian paradigm baru lembaga pendidikannya. Oleh karena itu pada tahap pencarian paradigm baru yang berlangsung antara tahun 1992 sampai 2000, Lembaga Pendidikan Ma'arif berusaha menyediakan buku ke-NU-an untuk dijadikan bahan pelajaran di tingkat SLTP. Selain itu, Lembaga Pendidikan Ma'arif berusaha membuka jurusan-jurusan baru di beberapa SMK sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikannya dengan memberikan predikat *unggulan* pada madrasah/sekolah yang berstatus *disamakan* di masing-masing daerah.

Sistem pendidikan dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dengan tambahan mata pelajaran ke-NU-an.

5. Untuk operasionalisasi program-program pendidikan, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY membentuk Yayasan Ma'arif NU DIY. Yayasan inilah yang menangani secara teknis pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY. Yayasan ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada madrasah/sekolah untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan satuan pendidikannya. Di setiap tingkat cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan bersama setiap bulan, seperti masalah kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas guru, pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian bersama, penerimaan siswa baru, pakaian seragam sekolah dan masalah kependidikan lainnya. Lembaga-lembaga Pendidikan Ma'arif tumbuh dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pendidikannya tergantung satuan pendidikan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hubungan yayasan dengan lembaga-lembaga pendidikannya bersifat demokratis. Dalam arti, yayasan tidak memaksakan

kehendak kepada lembaga-lembaga pendidikannya untuk melaksanakan apa saja yang diinginkan dan lembaga-lembaga pendidikannya tidak merasa terpaksa melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam rangka pengelolaan lembaga-lembaga pendidikannya, sudah tentu ada koordinasi dengan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), sedangkan pengelolaan sekolah berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, *Islam di Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1974

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Aboebakar, H., *Sedjarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitya Buku Peringatan, 1957

Alimi, Anas Syahrul dan M. Fadhilah Zaidie (ed.), *Reformasi dan Masa Depa Pendidikan di Indonesia (Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar, MS)*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1999

Al-Qardhawi, Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, Terj. H. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Anam, Choirul, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Sala: Jatayu, 1985

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU

Anis, Ibrahim, et.al., *Al-Mu-jam al-Wasit*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972

Arsip daftar lembaga-lembaga pendidikan di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif di Yogyakarta tahun 1998/1999

Asrahah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Attar, Farid al-Din, *Muslim Saints and Mystic*, Trans. A.J. Arberry, London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1966

Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari jalan Keluar*, Yogyakarta: LkiS, 2000

Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: PPIM, 1998

Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998

-----____________-___, Pendidikan Islam: *Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung Mizan, 1994

_____________, *NU: Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta, LkiS, 1994

Data Madrasah/Sekolah di Lingkungan Ma'arif tahun Ajaran 1985/1986

Daulay, Haidar Putera, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001

Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*, Jakarta: Ditjen Bimbana Islam, 1998

_____________, Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren, Jakarta: Ditjen Bimbana Islam, 1985

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994

Fadjar, A. Malik, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia, 1999

___________, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Jakarta: Mizan, 1998

Falaak, M. Fajrul, *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999

Fealy, Greg dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara*, Terj. Ahmad Suaedy dkk., Yogyakarta: LkiS, 1997

Feilladr, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Terj. Lesamana*, Yogyakarta: LkiS, 1999

Freire, Paulo, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Gibb, H.A.R. and H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1974

Gunawan, Ary H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama, Jakarta: Sekjen PBNU, 2001

Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2001, Jakarta: PP Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, 2001

Ilyas, Yunahar, dkk. (ed.), *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*, Yogyakarta: Kerja sama LPPI UMY, LKPSM NU dan PP Al-Muhsin Yogyakarta, 1994

Joesoef, Soelaiman dan Slamet Sanntoso, *Pengantar Pendidikan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981

Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogykarta: LkiS, 1995

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

Keputusan Menteri Agama Nomor 363 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah

Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah

Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 1988 tentang Perguruan Tinggi Swasta

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 054/U/199 tentang Sekolah Lanjutan Pertama

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa

Kholik, Abdul dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Kurikulum Sekolah dan Madrasah Lembaga Pendidikan Ma'arif, Jakarta: Lembaga Lemaslhatan Keluarga Nahdlatul Ulama Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DI Yogyakarta Ma'arif dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1982

Laporan Kegiatan Yayasan Ma'arif NU DI Yogyakarta Periode 1992/ 1997

Laporan Kegiatan Yayasan Ma'arif NU DI Yogyakarta Periode 1999

Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997

___________, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramidina, 1992

Maksum, H., *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Mansur, H.M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU setelah kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga, 1992

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994

___________, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991

McGrath, Earl James, *Education: The Wellspring of Democracy*, Alabama: University of Alabama Press, 1951

Milles, Mattew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992

Muchtarom, Zaini, *Santri dan Abangan di Jawa*, Terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1988

Mulkhan, Abdul Munir, dkk., *Religiusitas Iptek: Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Mulkhan, Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, Yogyakarta: Sipress, 1993

___________, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Sipress, 1992

Muzadi, H. A. Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1994

Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1980

STITNU, *Panduan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta 1996/1997*

PBNU, *Rancangan Materi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1999-2004*, Jakarta: Panitia Muktamar XXX NU, 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Daerah Nomor 103 Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jakarta

Poerbakawatja, Soergada, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1976

Presodjo, Sudjoko, et.al., *Profil Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982

Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993

Riyadi, Slamet dan Tasmiyan (Peny.), *Kumpulan Makalah Penunjang Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Tentang Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI*, Jakarta: Departemen Organisasi dan Kelembagaan ICMI, 1994

Robbins, Stephen P., *Perilaku Organisasi: Konsep, Kotroversi: Aplikasi*, Terj. Hadyana Pujaatmaka, Jilid , Jakarta: Prehallindo, 1996

Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, Jakarta: Amissco, 1996

Situmpol, Einar Martahan, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989

SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Tahun 1975

Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, Terj. H. M. Muljadi Djojomartono, Jakarta: tp., 1996

Stoner, James A.F, dkk., *Manajemen*, Terj. Alexander Sindoro, Jilid 1, Jakarta: Prenhallindo, 1996

Streenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1994

Sumardi, Muljanto, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*, Jakarta: LPIAK Balitbang Agama Depag, 1977

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998

Tibawi, A.L., *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National Systems*, London: Luzac and Company Ltd., 1979

Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera, 1993

__________, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Tim Tujuh, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926*, Tidak diterbitkan, 1983

Tobroni, dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: Sipress, 1994

Undang-uandang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Woodward, Mark R. (ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1998

__________, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticisme in The Sultanate of Yogyakarta*, United States of America: The University of Arizona Press, 1989

Yukl, Gary, *Kepemimpinan dan Organisasi*, Terj. Yusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo, 1998

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979

Zuhri, Saifuddin, *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1987

Majalah-majalah:

Al-Jamiah, No. 54 tahun 1994

Aula, Nomor 06/Tahun XVII/Juni/1995

Bangkit, No. 1 November-Desember 1992 dan No. 5 Juli-Agustus 1993

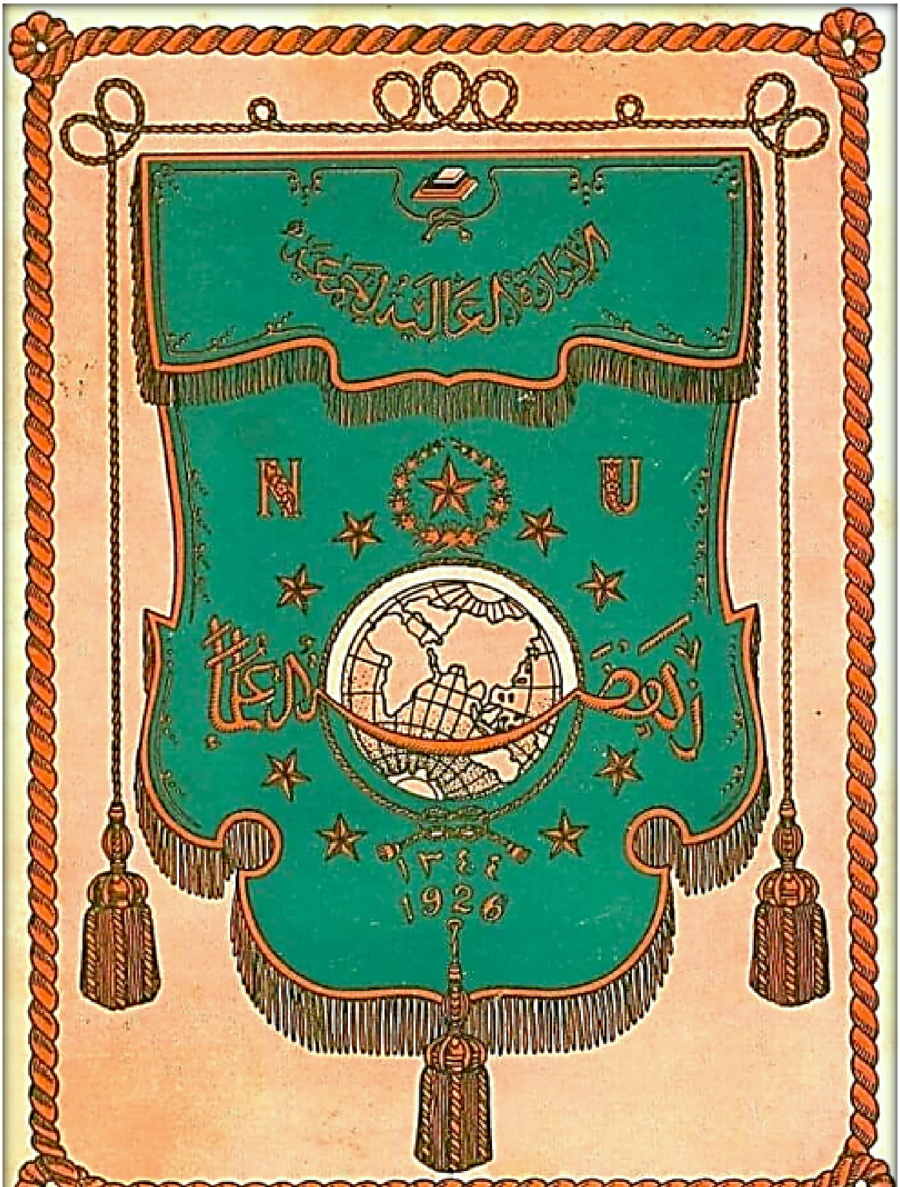
Prisma, No. 4 Edisi April 1984

Ulumuddin, No. 1 Edisi Maret 1996

TENTANG PENULIS



Jamal Syarif, M.Ag., lahir di Barabai, 24-07-1976. Anak ketujuh dari pasangan H. Iberani dan Hj. Lamsinah, sudah berkeluarga dengan memiliki dua orang putra. Menempuh pendidikan di SDN Barabai Timur I, MTsN Pantai Hambawang, dan MAN 2 Barabai. Melanjutkan pendidikan S1 di jurusan PAI, IAIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 1999. Di tahun itu pula melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 bidang Pendidikan Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus tahun 2001. Pernah Asesor BAN S/M Prov. Kalimantan Selatan mulai 2019. Sejak 2001 menjadi dosen tetap di Jurusan PAI UIN Antasari Banjarmasin dan membantu mengajar di IAI Darussalam Martapura. Telah menulis beberapa buku yang sudah terbit adalah *Mengenal Islam* (El-Kahfi, 2003); *Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Antasari Press, 2015); *Ramah Berbahasa: Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa Asing*, jilid 1 dan 2 (Antasari Press, 2019); serta *Di Mahang Awal Bermula*, dalam *Mengajar Tanpa Batas: 70 Tahun Kamrani Buseri* (Antasari Press, 2020). Pernah mengikuti *Progress to Proficiency in English Course, International Training Programme,* di *The English and Foreign Language University* (EFL-U) Hyderabad, India, Januari-Maret 2018; serta ANU *Indonesia Institute Postgraduate Workshop*, Canberra Australia, 12-13 September 2018. Alamat email: syarifjamal@yahoo.co.id


N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI

BANJARMASIN









ISBN 602-0828-27-1

9 786020 828275

Diterbitkan:
IAIN ANTASARI PRESS
Jl. Ahmad Yani Km. 4,5 Kalimantan Selatan 70235
Telp. 0511 - 3256980
E-mail: antasaripress@iain-antasari.ac-id.